



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI VI DPR RI
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI PERDAGANGAN RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 17 (Tujuh belas)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.38 s.d. 16.44 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI,
Gedung Nusantara I Lt. 1
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Martin Manurung, S.E., M.A.
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P.Nasdem)
- Acara : 1. Pembahasan RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025;
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2023 dan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2024;
3. Lain-lain
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
28 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)**
9 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima
 2. Adisatrya Suryo Sulisto
 3. Rieke Diah Pitaloka
 4. ST. Ananta Wahana, S.H., M.H.
 5. Sonny T. Danaparamita
 6. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
 7. Sondang Tiar Debora Tampubolon
 8. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.
 9. I Nyoman Parta, S.H
 - 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)**
5 dari 8 orang Anggota
 1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
 2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
 3. Ir. H. Mohamad Idris Laena

4. Doni Akbar, S.E., M.M.
5. Drs. H. Dadang S. Muchtar

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P. GERINDRA)

4 dari 8 orang Anggota

1. H.M. Husni, S.E., M.M.
2. Ir. H. La Tinro La Tunrung
3. M. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., MBA.
4. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)

2 dari 6 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

0 dari 6 orang Anggota

-

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

1 dari 5 orang Anggota

1. Muslim SHI., M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

3 dari 4 orang Anggota

1. Amin AK, M.M.
2. Hj. Nevi Zuairina
3. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

4 dari 4 orang Anggota

1. Dr. H. Jon Erizal, S.E., MBA.
2. Abdul Hakim Bafagih
3. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.
4. Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota

-

B. UNDANGAN/PEMERINTAH:

Menteri Perdagangan RI (Zulkifli Hasan, S.E., M.M.) beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, kita mulai ya, Pak Menteri ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri
Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, dan Pak Wamen,
beserta seluruh jajaran dari Kementerian Perdagangan,**

Kita mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat dan karunianya, kita bisa melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada hari ini. Tentu kita dalam forum ini juga mengucapkan turut berdukacita meninggalnya ibunda dari Pak Mohamad Hekal, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, tadi siang.

Bapak-Ibu dan Hadirin yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI, rapat kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 18 orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI yang terdiri atas 7 fraksi, dengan demikian kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Pasal 276 ayat (1), maka perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.

Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.38 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Sesuai dengan undangan rapat yang telah kami sampaikan, Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari ini adalah pembahasan mengenai:

1. Pembahasan RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025;
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2024; dan



3. Lain-Lain.

Kami ingin mendapatkan persetujuan, sesuai jadwal pada hari ini, apakah kita bisa akhiri pada pukul 16.00?

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu dan Hadirin sekalian,

Sebagaimana kita ketahui dalam siklus anggaran, kita akan membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang disusun setiap tahun berdasarkan pagu indikatif oleh pemerintah.

Dapat kami sampaikan, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024, dan hasil keputusan rapat dalam *konsinyering* dengan pejabat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 5 Juni 2024, Pagu Indikatif Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ditetapkan sebesar Rp1.658.999.354.000,00, turun ini, Pak, ya? Yang kemudian terdiri dari:

- A. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.375.326.283.000,00,
- B. Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp126.849.985.000,00,
- C. Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp156.823.086.000,00 ,serta
- D. Usulan tambahan Anggaran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp2.400.000.000.000,00, yang akan digunakan untuk:
 - a. Peningkatan peran 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan sebesar Rp900 miliar,
 - b. Pengembangan perdagangan antarwilayah sebesar Rp700 miliar,
 - c. Peningkatan ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi sebesar Rp800 miliar.

Nah, ini pada waktu *konsinyering*, seingat saya masih belum didetailkan ya waktu itu, dengan Pak Sekjen kita *konsinyering*. Jadi, momen raker ini bisa untuk mendetailkan usulan tambahan anggaran ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya.

Kami persilakan.



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, dan
Salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Pertama-tama, kita puji syukur atas nikmat Allah yang diberi kepada kita, hari ini kita bisa mengadakan rapat kerja dalam rangka membicarakan RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025, sekaligus Evaluasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Semester 1 Tahun 2024. Kami telah mendapat laporan dari Saudara Sekretaris Jenderal bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni, telah dilaksanakan *konsinyering* seluruh unit Eselon I Komisi Perdagangan dan Komisi VI DPR, berjalan dengan baik, kami mengucapkan terima kasih.

Yang kedua, harusnya kita rapat tanggal berapa kemarin? Tanggal 11.

Pimpinan dan Anggota,

Saya minta maaf enggak bisa hadir kemarin, karena menghadiri acara OIC di Turki sekaligus pertemuan D-8. D-8 itu kumpulan negara-negara berkembang, ada Turki, Indonesia, ada Pakistan, ada Malaysia, dan lain-lain. Kemudian OIC itu 57 negara OKI ya, tapi di bidang perdagangan ya kita pertemuan kemarin selama 2 hari, semalam, saya Senin-Selasa di sana, ada bilateral juga dengan Nigeria, Nigeria dan apa namanya, Irak, dan satu lagi, eh, Turki ya dengan Turki, ya. Jadi baru kita rapat kerja hari ini.

Yang kedua, saya tentu, kami semua dari Kemendag mengucapkan belasungkawa yang mendalam, *Innalillahi wa inna Ilaihi rojiun* atas pulangnya ibunda Pak Mohamad Hekal. Saya tadi mengejar ke rumah Pak Fuad Bawazier, itu sahabat lama saya, sahabat dekat, dulu pendiri PAN itu ya, juga pernah DPR dari PAN, Pak Fuad Bawazier. Jadi, saya tadi ke rumahnya. Dulu sering diskusi di rumah itu, tapi rupanya langsung dibawa ke masjid dan saya kejar ke masjid, sudah dibawa ke pemakaman.

Saudara-saudara yang saya hormati atau yang terhormat,

Rencana kerja Kementerian Perdagangan tahun 2025 fokus pada empat arah kebijakan untuk perdagangan, yaitu pengembangan ekspor, pembinaan UMKM, perdagangan antarwilayah, pengamanan perdagangan. Arah kebijakan ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dan rancangan RPJPMN 2005-2009 berupa peningkatan pangsa pasar ekspor barang Indonesia di dunia, dari 1,2% tahun 2022 menjadi 1,43% tahun 2029.



Peningkatan perdagangan antarwilayah seperti kali lipat, tiga kali lipat targetnya, *tapi* kalau anggarannya, enggak mudah ini. Anggaran kami turun terus, Pak Ketua. Dari 3 triliun turun 2,4. 2,4 turun lagi 2,1. Turun lagi 1,9, sekarang 1,6. Jadi ini sudah enggak bisa ke mana-mana, Pak, sudah iya, rutin, anggaran rutin saja begitu, bahkan ini agak ada bisa terancam ditarik *gitu*, karena uang sewa rumahnya dari Kemenlu ditarik juga, uangnya enggak ada. *Kan* biasanya dari Kemenlu sewa-sewa rumah dari atase 52 negara, sekarang enggak boleh lagi dari dari Kemenlu, karena Kemenlu kurang juga *gitu*, ya itulah kira-kira kenyataannya ya.

Tentu untuk mendukung rencana Kementerian Perdagangan tersebut, sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif dengan Kementerian/Lembaga dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 untuk Perdagangan, yaitu, tadi yang saya sampaikan, 1,6, 1.658,999 triliun. Pagu indikatif ini mengalami penurunan sebesar dari turun, turun, turun, ini sekarang turun lagi. Jadi, kalau dibanding 1,9 ya 300-an, itu turunnya ya, atau turun lagi hampir 16% dari yang kemarin. Padahal awalnya *kan*, kalau dihitung dari awal, 3 triliun, Pak, jadi banyak sekali turunnya. *Nih* 2021 3,2 hampir ya, tahun 2022 turun 2,1, 2023 naik lagi 2,4. Tahun 2024 turun 1,9. Tahun 2005 *ah* turun lagi 1,6, Pak, tinggal separuh ini Pak. Jadi, dari 22, 2021 turunnya separuh, *gitu*.

Selanjutnya, pagu indikatif Kemen Perdagangan tahun 2025 tersebut terbagi untuk belanja operasional dan non operasional dengan *rinci*-an, sebagai berikut:

- Belanja operasional, 1,1. 1,1, sudah mau habis *tuh*, Pak, sudah 1,1;
- Belanja pegawai, 675; dan
- Belanja barang, 458;
- Belanja non operasional, 525.

Selanjutnya, secara *rinci*, pagu indikatif Kemen Perdagangan tahun 2025 per program dan unit Eselon I dapat dilihat pada tabel ini, Pak. Sudah ada tabelnya, ini, saya enggak usah baca lagi, ya.

Alokasi pagu indikatif tahun 2025 pada program dukungan manajemen dan manajemen lebih besar dari alokasi anggaran program teknis, karena sebagian besar anggaran program tersebut dialokasikan untuk belanja operasional di seluruh unit kerja Kemen Perdagangan. Sementara itu, alokasi anggaran untuk program teknis dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMN, Renstra, dan RKP, Rencana Kerja Tahun 2025.

**Bapak-Ibu, dalam
Pimpinan,
Anggota Komisi VI yang terhormat,**

Dalam upaya mendukung pencapaian program tersebut di atas, Kementerian Perdagangan telah menyusun kegiatan prioritas di 2025, yaitu



pengembangan *e-commerce*, kecil ini cuma 2 miliar, cuma anggaran bupati ini, Pak, ya, 2 miliar, Pak, ya itu. Fasilitas usaha ekspor melalui *export center*, 58 miliar, fasilitas pelaku usaha besar usaha pasar domestik kemitraan pemasaran, 23 miliar. Kecil-kecil, Pak, sekarang, seadanya ini.

Pengamanan perdagangan internasional yang meliputi tindakan pengamanan perdagangan penanganan kasus hambatan teknik perdagangan dengan anggaran 11, 5 miliar, enggak sampai sejuta dolar, Pak, ini, 15 miliar. Ini paket hemat ini, daripada enggak ada, ya ada, *gitu*. Pengembangan perdagangan berjangka *komoditi*, resi gudang, pasar lelang *komoditi*, dan lain-lain, 9 miliar. Pengembangan perdagangan antarwilayah Indonesia, 37 miliar. Pengembangan SDM, 47 miliar, Pak. Penyediaan data bapokting yang meliputi pencatatan data harga barang, kebutuhan pokok, pemantauan perdagangan, dan lain-lain, 11 miliar. Perlindungan konsumen, 42 miliar. perundingan perdagangan internasional meliputi perundingan dan ratifikasi perjanjian internasional, 22 miliar. Ini kecil sekali, Pak, padahal kita ini keliling *nih*. Ada Eropa, ada Timur Tengah, ada Afrika *gitu*, 22 miliar. Biasanya yang berangkat mungkin lima orang, sekarang mungkin dua orang ini.

Memperhatikan keterbatasan pagu indikatif Kementerian Perdagangan tahun 2025 sebesar 1,658, tentunya kami berupaya untuk mengalokasikan secara optimal pada program kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Namun demikian, apabila keuangan negara memungkinkan, Kementerian Perdagangan mengajukan, oleh karenanya kami enggak berlebih juga mengajukan, tapi kami tahu enggak mudah, *gitu*, tambahan anggaran yang telah kami sampaikan kepada presiden melalui surat per tanggal 30 April, perihal Permohonan Tambahan Anggaran Tahun 2025 sebesar menjadi 2,4 *kan*. *Udah* enggak mungkin itu *mah*, jadi minta 2,4 ini, ini minta yang enggak mungkin ini, Sekjen lucu juga *sih*. Enggak usah, 2,4 *aja* kami sudah senang banget, Pak. Lumayan, Pak. Total, Pak, bukan nambah, jadi nambahnya berapa *tuh* kalau 2,4. Iya, kalau bisa itu *aja*, kami sudah cukup, Pak.

Kenapa? Untuk, Pak, kita ini *kan* mau ekspor, kita inikan mau bersaing dengan negara-negara lain, kita mau mendekatkan ekspor, *loh* ini gimana, orang Atdagnya *aja* mau pulang sekarang, karena biaya gaji, sewa rumah, segala macam, yang biasanya selama ini dari Kemenlu juga dihapus, dari kita juga dikurangi, *gitu*.

Sementara kita punya target ekspornya meningkat, apalagi sekarang diminta untuk mengembangkan daerah-daerah nontradisional. Jadi, kita sebetulnya tujuannya ke situ ya. Pak, kalau lihat negara lain itu, Malaysia saja, enggak usah jauh-jauh, tetangga Malaysia itu, itu untuk mempromosikan kulinernya saja, Pak, itu triliunan. Jadi, kalau kita makan restoran Malaysia itu, itu didukung habis-habisan oleh pemerintahnya. Apalagi Thailand, Pak. Thailand itu Pak, kalau dia mau ekspor buah baru belum untung, itu biayanya ditanggung pemerintah. Mau ngirim apa, misalnya mangga, mau ngirim durian *gitu* ya, ditanggung pemerintah. Lah kita ini, Pak, *cost* saja, *cost* sewa rumah saja sekarang hampir gulung tikar *gitu*.



Nah itu, tolong teman-teman DPR lah, enggak tahu nanti caranya *gimana* ini.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Apalagi ITPC ya, Pak, ya.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Iya itu, ITPC sama, ya itu, Pak, sama, ITPC apalagi, Pak. *Showroom-showroom*-nya bisa tutup semua *tuh*, Pak, *gitu*, padahal kita pengennya *kan showroom* itu di tengah tempat yang bagus, yang layaklah, pantas *gitu*. Kalau negara besar itu *showroom*-nya bagus, *gitu*.

Nah, karena terus-terang, kalau saya ke luar negeri itu, Indonesia itu sangat dihormati. Kemarin di Turki, Pak, orang-orang itu segan semua sama kita.

ANGGOTA KOMISI VI DPR RI:

Karena belanjanya banyak.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Dan, enggak, memang bukan soal belanja, Pak. Memang Indonesia dihormati. Bagaimana tidak, lah Indonesia ini *kan* 280 juta ya, *size* ekonominya 1,4 triliun, Pak. Jadi kita sudah termasuk 15 ekonomi terbesar di dunia, orang tahu, inflasi kita enggak sampai 3%. Turki itu 70%, Pak, inflasinya, *gitu*. Ekonomi kita tumbuh, surplus kita, Pak, 40 bulan, dagang itu surplus, orang tahu, *gitu*. Dunia *kan* sudah satu, maka kita sangat dihormati. Terus stabilitas, pemilihan presiden yang rumit, aman *gitu*, enggak apa-apa, lancar, ya *kan*? Bertengkar depan TV, di belakang foto-foto, *gitu*. Jadi kita memang dihormati, Pak, *gitu*.

Jadi sebetulnya selangkah lagi, kita ini bisa, kalau kita bisa menduniakan produk-produk kita, Pak, memang 2045 itu yakin jadi negara maju. Bahkan, Pak, saya waktu pertemuan APEC, Menteri Perdagangan Tiongkok itu bilang, dia bilang, "Kami tahu semua data mengenai Indonesia. Indonesia harus percaya diri, enggak lama lagi saudara jadi negara maju." Itu Menteri Perdagangan Tiongkok, Pak, yang *ngomong*.

Baik, selanjutnya kami sampaikan terkait evaluasi kinerja anggaran Kemen Perdagangan tahun 2023, Semester I tahun 2024, realisasi sebesar 2,3, Rp2.390.245.330.000,00 atau 97,53% dari total pagu 2.390. Total 97% dari total pagu yang tersedia. Adapun pada tahun 2024, realisasi anggaran Kemen Perdagangan per tanggal 12 Juni, ini tadi 2023 ya, 24, 734 miliar 337



juta, eh 300, iya 30.126.887 rupiah atau 37,33%. Realisasi anggaran secara detail dapat kita lihat pada tabel, Pak. Jadi tidak usah dibaca lagi, ada tabel.

**Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI yang terhormat,**

Saya kira secara garis besar, itu secara singkat mengenai kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024 beserta rencana program kegiatan Kementerian Perdagangan tahun 2025.

Izinkan kami untuk mohon dukungan kepada seluruh Pimpinan Anggota Komisi VI DPR RI terhadap rencana kerja Kementerian Perdagangan tahun 2025. Jadi, mohon dukungannya, Pak, kalau bisa enggak usah nambah banyak-banyak, bisa kembali seperti tahun ini saja, sudahlah. Tahun ini *aja*. Kalau turun ini *kan*, Pak, turunnya banyak lagi, berapa? 16% ya? Jadi kembali bisa naik 16% saja dari itu, kami sudah, kami tahu juga lah anggaran negara mungkin lagi *anu ya, gitu*.

Saya kira demikian, Bapak-Bapak, Pimpinan yang terhormat.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI
VI DPR RI):**

Walaikumsalam,

Makasih, Pak Menteri.

Dan *kayaknya* Pak Menteri enggak sendirian. Semua kementerian yang rapat dengan kita, anggarannya turun di atas 35%. Jadi, antara 35 sampai 40% anggarannya turun. Tapi, nanti kalau itu pendalaman dari saya masih nanti. Jadi, saya enggak mau merebut hak anggota.

Saya persilakan, Pak Harris dulu. Ya enggak apa-apa. Ayo, Pak Harris, *monggo*.

F-PDIP (Ir. HARRIS TURINO, M.Si., M.M.):

Nggeh, terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan, dan
Rekan-rekan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Pak Menteri Perdagangan,
Pak Wamen,
beserta seluruh jajarannya,**



Ini menarik, Pak. Anggaran dipaparkan tadi, mulai dari 3 triliun, turun, turun, turun terus ya, sampai di 1,6. Tetapi kita harus jujur memberikan apresiasi, Pak, bahwa neraca perdagangan kita 40 bulan selalu positif. Dan harapannya adalah ke depan ini harus terus positif, Pak, karena kita tahu, kita selalu negatif di neraca jasa. Salah satu anggaran, eh andalan kita di neraca pembayaran adalah tetap hanya mengandalkan di neraca perdagangan barang, karena jasanya kita selalu negatif.

Nah, mengenai anggaran yang turun terus, Pak, mungkin bisa diinformasikan ke kami, sebenarnya usulan ini dari mana *sih*, Pak? Kenapa pemotongannya sedemikian besar dan hampir di semua departemen maupun lembaga? Dan penurunannya besar sekali? Mungkin bisa dielaborasi, apakah memang ini keputusan dari presiden saat ini atau presiden terpilih, Pak? Karena ini jadi menarik dan turun ini padahal APBN-nya *kan* naik. Ini alokasinya akan digunakan seperti apa? Karena ini, menarik *kan*, ini *kan* kesepakatan antara kementerian, Kementerian Keuangan dan Bappenas, ya. Kira-kira ide di belakangnya apa, supaya kami lebih bisa memahami, Pak.

Termasuk juga kami lebih bisa memahami ketika ada usulan tambahan, Pak. Tadi Pak Menteri mengatakan, kalau kembali ke 1,9 lagi, ya itu sudah *Alhamdulillah* ya, 2,1. Nah, tadi mengusulkan bahwa ada tambahan 800, tetapi di paparan resminya ada tambahan 2,4. Jadi nanti mungkin sebagai kesimpulan rapat, tentu kami mohon klarifikasinya, yang akan kita perjuangkan ini yang mana? Apakah yang 1,6, apakah 1,9, apakah 2,1, apakah 2,4 atau 4 triliun? Karena tentu ini harus ada basisnya, sebelum Komisi VI memberikan persetujuan.

Tadi juga Bapak mengungkapkan, bahwa keyakinan penuh 2045 menjadi negara maju. Ini harapan dari kami semua, Pak, juga harapan dari seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi kalau kita lihat, Pak, definisi dari negara maju adalah tentu per kapita *income*-nya di atas batas dari negara maju. Estimasinya untuk 2045, batas negara maju per kapita *income*-nya adalah 30.000 US Dolar. Jadi, mengambil *margin of error* 10%, minimal kita harus ada di 33.000 US Dolar per kapita *income*. Dan kalau kita lihat, dari angka sekarang dan kita ekstrapolasi ke 2045, maka dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 sampai 9%. Menurut *analisa* Pak Menteri, apakah hal ini mungkin? Karena dari pembacaan pagu yang dibawakan oleh Menteri Keuangan saja kemarin, pertumbuhan ekonomi 2025 hanya di 5,2% ya.

Kemudian mengenai satu, Pak, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8, Pak, ini yang menjadi isu besar, Pak. Permendag Nomor 8 ini, ini *kan* dianggap sangat berpihak pada importir umum, Pak, sama pemilik dari APIU, Pak, ya, tidak pro terhadap peningkatan industri tekstil domestik, Pak. Banyak pihak sudah memberikan *analisa*, bahwa apabila Permendag ini tidak dicabut, maka dalam satu tahun ada 55, maaf saya ralat, ada 120 pabrik tekstil akan tutup dan kira-kira 120.000 pekerja akan mengalami PHK tahun depan. Data sekarang sudah ada 11 pabrik tekstil yang tutup, 8 ada di Jawa Tengah, Pak, sehingga bagaimana pandangan Menteri mengenai ini?

Karena Permendag Nomor 8 ini *kan* pada hakikatnya mencabut Pertek dari Kemenperin. Dan Pertek ini selama ini digunakan sebagai bendungan utama terhadap arus masuknya tekstil dari luar negeri. Dan memang kalau dibiarkan terbuka, kita memang tidak mampu untuk bersaing. Sehingga harapannya, kalau Permendag Nomor 8/2024 ini bisa dipertimbangkan untuk ditinjau ulang demi kepentingan industri tekstil dan produk tekstil nasional.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaiikumsalam,

Silakan, Pak Husni.

F-P. GERINDRA (H.M. HUSNI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI dan Teman-teman Komisi VI,
Yang saya hormati Menteri Perdagangan dan seluruh jajaran,**

Cukup menarik apa yang Pak Menteri sampaikan tadi, tentang rencana kerja tahun 2025. Empat arah kebijakan Kemendag, di situ ada pengembangan ekspor, kira-kira pagu tambahannya lebih kurang 800 miliar di sini. Kemudian pembinaan UMKM, kemudian perdagangan antarwilayah, yang juga pagu anggaran tambahannya lebih kurang 700 miliar. Kemudian rencana kerja 2025, yang keempat yaitu pengamanan perdagangan.

Ini sangat menarik sekali, Pak. Dengan angka 800 miliar untuk pengembangan ekspor. Di pagu tambahan kita bisa lihat, Pak, kelihatannya negara kita dengan 270 juta penduduknya ya, tentunya apabila bisa terealisasi pengamanan ekspor, tentunya itu akan memberikan devisa dan juga membantu tenaga kerja yang ada di dalam negeri.

Tapi mirisnya, Pak, kita berapa kali berkunjung ke negara-negara sahabat, jangankan produk yang dihasilkan oleh industri kita, mangga *aja* enggak bisa masuk ke negara orang, Pak, itu mangga kita. Jadi, tapi dengan begitu mudah dan gampang produk-produk impor itu masuk, seolah-olah tanpa proteksi apa pun. Kita bisa lihat di TikTok *tuh*, macam-macam mereka menjual produk-produknya.

Begitu juga, Pak, untuk pengembangan perdagangan antarwilayah. Sepertinya, Pak, kita belum atau tidak ada tata niaga tentang bagaimana



data-data sumber produktivitas di dalam negeri kita. Begitu kita panen cabai, panen sayur, itu *sebahagian* besar mungkin dilemparkan ke Pulau Jawa, akhirnya menumpuklah produk-produk pertanian kita di Pulau Jawa dan didistribusikan untuk daerah-daerah provinsi-provinsi yang lain dan ini menyebabkan *double cost* namanya ya, dua kali bayar.

Begitu juga tentang adanya perang dagang antara China dan Amerika, ini mestinya peluang-peluang seperti ini kita bisa ambil *tuh*, Pak. Ada lebih kurang ya, ada lebih kurang 20.000 sekarang industri-industri ekspor di Yiwu, Provinsi Zhejiang, China itu Pak, itu sekarang mereka tidak bisa melakukan ekspor barang-barangnya ke negara-negara Eropa maupun Amerika. Saya ada mendengar, bahwa mereka ingin melakukan investasi barang setengah jadi di Indonesia, yang bisa diekspor oleh pabrik-pabrik yang ada di dalam negeri, yang tentunya itu meningkatkan daripada devisa, memberikan kesempatan untuk tenaga kerja dan juga tidak merusak industri-industri yang ada di dalam negeri.

Ini kemudian ada, waktu Pak Menteri melakukan sidak gas, ya yang terakhir kalau enggak salah saya, sidak gas, gas 3 kilo bisa isi 2,2, 2,5, pokoknya di bawah 3 kilogram, tapi hari ini *toh* masih terjadi juga hal seperti itu. Begitu juga Bapak melakukan sidak tekstil ke Tanah Abang, itu Tanah Abang itu Pak, itu dulu pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara, dulu, Pak. Tapi yang hebatnya, sekarang di Tanah Abang ada pula namanya Pasar Bangkok, Pak, ya. Sedangkan saya *tuh* tahu, barang-barang yang dari Thailand itu semua yang dimasukkan ke dalam negeri kita dalam bentuk barang jadi, itu diproduksi di daerah nama pasarnya Baima, daerah anunya, namanya Guangzhou *tuh*, Pak, ya.

Nah, jadi tentunya pasti ada hal yang salah di sini. Kita itu *dulu*, sebelum tahun 2000 *tuh*, Pak, ya, sebelum krisis ekonomi, tekstil kita itu primadona, Pak. Ya, saya ulang lagi, tekstil kita itu primadona. *Tapi* hari ini, terus-terang, itu tergerus. Kalau Bapak datang lagi ke Tanah Abang, kalau boleh Bapak jangan ramai-ramai datang ya, biar Bapak lihat, hampir setengah kios-kios di sana tutup, Pak, ya. Harga sewa dulu yang harganya kita bilang setahun 200 juta, sekarang 25 juta pun enggak ada yang *tempatin*. Itu menandakan bahwa keadaan ekonomi kita, pasar tekstil kita itu sudah merosot ya.

Jadi apa yang disampaikan Pak Harris itu, tentang terlalu berpihak kepada pihak importir. Itu saya 25 tahun kerja tekstil, Pak, makanya saya paham betul masalah ini dari hulu sampai ke hilir. Bukan hanya 120 pabrik yang tutup, hari ini sudah terus ya, *mengantri*, *mengantri* PHK dan *mengantri* pabrik-pabrik itu tutup, Pak, ya. Itu baru pabrik, belum lagi, apa itu, TPT-nya Pak. Karena mereka katakan “Kenapa *sih* kita itu dalam negeri dibebankan biaya begitu besar, impor itu begitu gampang dan begitu mudah ya”. Karena tekstil ini, Pak, ini adalah padat ya, padat karya dia, dia paling banyak membutuhkan tenaga-tenaga pekerja.

Izin, Pak Menteri, ini apa pun ceritanya ya, di dalam masalah perdagangan ekspor-impor, negara kita ini adalah sebuah negara besar dengan 270 juta penduduknya. Hari ini kita bonus, kita bonus demografi ya. Kalau boleh, Pak, aturan-aturan perizinan dan lain sebagainya, mana yang bisa dipangkas, tolong dipangkas. Kita punya, apa, pembeli yang begitu besar, upah yang begitu murah, *resources* yang begitu banyak. Tentunya ini adalah *bahagian-bahagian* yang membuat para investor-investor, tentunya tertarik mereka untuk melakukan investasi perdagangan dan lain sebagainya di dalam negeri kita.

Jadi, satu hal lagi tentunya, mana ini lagi ya, ya satu hal lagi, tentunya kita mendukung tentang *anu*, apa, penambahan pagu tambahan indikasi dari Kementerian Perdagangan. Cuma di balik ini semuanya, tentunya harus memberikan nilai manfaat, nilai lebih dan sekali lagi, bukan kita tidak cinta, bukan tidak boleh impor ke dalam negeri kita, cuma jaga. Tolong dilihat, tolong dijaga, jangan akibat kemudahan-kemudahan yang kita berikan, akhirnya menghantam industri kita sendiri, membuat pengangguran yang begitu besar. Dan juga devisa kita hilang menguap begitu saja.

Jadi, tentunya harapan pada Pak Menteri, supaya bagaimana industri-industri kita bisa bertumbuh dan berkembang menggunakan tenaga-tenaga dalam negeri dan juga meningkatkan devisa negara. Saya pikir salah satu *gain* yang harus Pak Menteri capai adalah hal seperti itu. Barang-barang kita mudah diterima di negara-negara tujuan. Jangan barang orang begitu gampangnya di, masuk di tempat kita tanpa proteksi dan lain sebagainya.

Saya rasa itu *aja*, Pak Ketua. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, selanjutnya silakan untuk Pak Sonny Danaparamita.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Baik, terima kasih.

**Yang saya hormati Pimpinan, juga segenap Anggota,
Yang saya hormati Pak Menteri,
Wakil Menteri beserta seluruh jajaran,**

Sebelah nulis banyak *banget*, padahal ini daftar penerima Idul Qurban, Pak. Sudah banyak banyak yang sebelah. Kelihatan Pak Menteri adem itu kita akan tenang. Adem atau *anyep*, saya enggak tahu. Kalau adem itu mungkin karena *barokah*-nya Pak Menteri yang memang suka puasa Daud. Nah, *gitu*. Kalau terlihat *anyep* karena ya anggarannya turun. Nah, cuma yang saya juga bertanya itu, kenapa mulai kemarin, tadi Pak Pimpinan



menyampaikan, turun semua? Terus Pak Harris tadi sampaikan, ini karena presiden yang terpilih atau yang, yang masih eksis? Ya saya kira nanti itu butuh jawaban, karena Pak Mendag ini, kalau Pak Jokowi adalah orang kita, orang dalam, orang PAN, katanya *gitu*. Kalau yang terpilih, itu juga garis depan, garda depan, jadi pasti tahu semua, Pak Harris. Pasti dijawab nanti, enggak usah khawatir. Saya meyakini itu. Kalau enggak dijawab, berarti ya pura-pura enggak tahu, *gitu aja*. Tapi saya yakin orang puasa enggak mungkin berbohong.

Jadi, terima kasih. Yang kedua, karena ini tadi agendanya adalah RKA-K/L dan juga tentang evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. Kalau yang lain-lain soal usulan tentang, apa namanya, RKP, ya saya sikapi *aja* yang soal evaluasi, karena apa pun, ini adalah amanah kami, tugas konstitusi Pasal 20A. Kita punya fungsi di antaranya untuk melakukan pengawasan, apalagi terkait anggaran seperti ini. Dan ini juga paralel dengan paket Undang-Undang Keuangan Negara.

Kalau bicara paket keuangan negara, di antaranya lembaga lain adalah BPK. BPK juga sudah melakukan pengawasan atas kinerja dari Kementerian Perdagangan. Di, apa namanya, di ikhtisar laporannya yang semester 2 tahun 2023, di IHPS-nya itu kita bisa lihat. Dan salah satunya, saya mempertanyakan saja, mohon izin, Pimpinan. Itu disebutkan bahwa, Pak Menteri harus memerintahkan Dirjen PPI memberikan sanksi, terkait dengan tim perencanaan dan pengawas atas ketidakcermatan dalam menyusun RAB. Itu sudah dilakukan belum, Pak? Sudah? Bentuknya apa, Pak? Sanksinya bentuknya apa? Peringatan saja ya?

Nah, itu contoh saja. Maksud saya adalah, apa namanya, terhadap hal-hal seperti ini harus harus kita tindak lanjuti. Syukur kalau memang sudah diberikan sanksi. Saya takutnya yang diperintah BPK *aja* juga enggak mau melaksanakan, apalagi cuma pertanyaan dari anggota DPR. Kalau sudah dilaksanakan, saya akan melanjutkan beberapa pendalaman.

Jadi, terkait hal itu, saya mengapresiasi, meskipun ya harus dilihat juga apakah itu, kalau sampai BPK nulis kayak *gitu*, hanya peringatan, nanti *kan* diulangi lagi. Kalau bisa ya, cobalah yang yang bisa membikin efek jera. Sanksi itu kan salah satu fungsinya: satu, bisa memberikan efek jera, yang kedua, situasi seperti pada asalnya, seperti sebelumnya.

Yang berikutnya, terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di Kementerian Perdagangan. Saya cukup heran, meskipun ada adagium yang menyatakan, bahwa hukum tertatih-tatih dalam mengikuti perkembangan zaman, tapi juga ada banyak pendekar hukum kita, misal tentang hukum progresif yang menjelaskan dalam setiap peraturan, kita harus bisa menggambarkan, berimajinasi, agar itu bisa menciptakan ketertiban sosial, agar itu kalau dalam ilmu fikih, bisa membawa kemaslahatan.

Nah, saya kira kalau itu Pak Menteri lebih lebih detail, lebih paham soal soal itu ya. Enggak, itu dalam kitab ilmu fikihnya seperti itu, hukum dapat



berubah dengan syarat membawa kemaslahatan. Tapi kalau sering diubah-ubah, sebagaimana aturan Menteri Perdagangan Nomor 36, dalam 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, ya jadi masalah, Pak. Masa hanya dalam beberapa saat saja, itu perubahannya enggak sampai, kalau enggak salah lebih dari tiga kali.

Saya pernah S1 hukum *gitu*, kalau enggak salah dan saya sekarang masih melanjutkan. Orang mengenal tentang fiksi hukum, orang dianggap tahu dan sebagainya. Tapi saya membayangkan kalau pelaku-pelaku usaha ekonomi kita pada aturan mainnya, sudah dipelajari, membacanya sudah sampai hafal, besok diganti lagi, besok diganti lagi, *capek* dan itu yang di belakang hari ini, belakangan hari ini, agak menimbulkan kegaduhan.

Misalkan soal, apa namanya, yang kemarin di, apa namanya, kontainer-kontainer itu, soal Pretek ya kalau enggak salah, Pertek itu dan sebagainya. *Saking* bingungnya saya, soalnya lihat Pak Menteri cuman *gini-gini aja*. Itu adalah contoh, termasuk tentang batasan bawaan Pekerja Migran Indonesia. Saya enggak tahu ini nanti akan diubah lagi, diubah lagi, atau *gimana*. Tapi saya membayangkan, Pak, kalau seperti itu, ini salahnya di mana saya enggak ngerti. Apakah zaman yang terlalu cepat berubah atau anak buah Bapak yang kurang memahami bagaimana menyusun peraturan yang baik dan benar. Kalau kurang memahami itu, saya kira saya setuju Bapak mengusulkan penguatan SDM-lah. Belajar bukunya Satjipto Rahardjo, belajar bukunya pendekar-pendekar hukum yang lain, enggak perlu, enggak perlu yang yang jauh-jauh.

Jadi, saya kira itu penting. Karena berikutnya lagi pertanyaan saya, saya ingin menanyakan, apa namanya, tentang *TikTok Shop*. Karena hari ini saya di *inbox*, *inbox* juga di Medsos saya, mereka itukan hanya tampilannya saja, *tapi* mereka masih masih beroperasi soal itu. Kalau sudah *kayak gitu*, berarti Permendag 31 Tahun 2023 ya seperti macan ompong, hanya di atas kertas saja. Bahwa itu kemudian ada masa transisi dan sebagainya, ya tidak seperti itu.

Kalau bicara komitmen pada UMKM, Menteri Koperasi UMKM teriak kencang, Kemendag memberi waktu. Ditanya Kominfo, saya akan pelajari dulu. Ini kabinetnya *kok* enggak, beda-beda itu *gimana sih?* Di akhir masa jabatan kasihanlah yang *gini* kalau tidak, *landing*-nya tidak bagus, kasihan. Tapi saya kira saya saya butuh butuh melihat itu, perkembangan tentang *TikTok Shop* itu seperti apa. Sembari soal kekhawatiran kita, karena ada *e-commerce* yang sebentar lagi ada luar biasa dari China yang pusatnya di Amerika. Belum ada satu tahun dia sudah beroperasi di 58 negara, kemudian model penjualannya dari pabrikan langsung ke konsumen. Mampus pelaku usaha mikro kita.

Dan tugas kita sebagai Bapak-bapak, *jenengan* semua sebagai negara, negara harus hadir di sana. Negara harus buat satu regulasi yang bisa menyelamatkan para pelaku UMKM kita. Jadi, ya saya tahu perdagangan, dagang itu jual beli, *tapi* kalau "Ayo dagang" itu dimaknai hanya



beli saja, menjadikan negara ini hanya menjadi pasar saja, saya cukup bersedih.

Sepintas saya senang melihat, tentu dengan segala apresiasinya, Pak Menteri yang langsung dari Turki ke sini. Kemarin juga ketemu dengan Menteri Perindustrian Nigeria, ada kenaikan 30% perdagangan kita. Saya senang, naik 30%-nya, *tapi* apakah perdagangan itu kita lebih banyak jualnya atau belinya? *Kok* kayaknya kita lebih banyak impornya daripada ekspornya. Dan enggak sebanding itu. Kenapa enggak digenjut yang lain saja? Sementara ini termasuk anggarannya adalah untuk yang 900 miliar ini untuk 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan. Marilah kita hentikan yang model-model *kayak gitu*. Jangan hanya republik ini dijadikan pasar saja.

Ya paling enggak *equal*-lah, kita ekspor 50, impor 50, tapi kalau perbandingannya sangat tinggi, kasihan saya, kalau teman-teman Anggota Fraksi PAN waktu ke dapil itu, Pak, dimarahi sama pelaku UMKM. Engga, ya saya menyampaikan, kalau benar, *makasih*, kalau salah, ya jangan marah *gitu kan*. *Kan* enggak berani juga langsung. Saya rasa itu saja, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam.

Kita ke kiri, Pak Deddy Sitorus.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Makasih, Pimpinan.

Bapak Menteri yang saya hormati,

Saya sengaja pakai baju warna biru ini, Pak. Supaya Pak Menteri mau mendengarkan apa yang saya sampaikan.

Pertama, selamat *dulu*, PAN nambah empat kursi, presidennya menang, iya *kan*? *Tapi* Pak Eko duduk di sana, malu-malu dia dekat Bapak. Mungkin Pak Eko pindah sini *dulu*, Pak. Kalau enggak, enggak jadi Menteri nanti, Pak.

Jadi pertama, Pak, ini saya mengulang apa yang saya sudah berkali-kali sampaikan, Pak. Tapi sebelum sampai ke sana, kecenderungannya *kan* memang semua anggaran kementerian dipangkas, Pak. Memang ada satu *logic* yang menurut saya sampai sekarang belum ada penjelasannya. RPJMN itu *kan* disusun untuk 5 tahun, Pak. Makanya, misalnya 2019 Pak Jokowi menang Pemilu, itu adalah anggaran 2018. Artinya *carry over* ke



pemerintahan yang berikutnya. Logikanya harusnya anggaran 2022, 2025 itu juga masih merupakan rangkaian dari rezim sebelumnya.

Nah, kita sudah menghadapi Covid begitu selesai Pemilu tahun 2019, 2020 kita sudah masuk Covid. Artinya, ada 3 tahun terbuang, sehingga yang namanya RPJMN itukan *by logic* tidak tercapai 100%, bahkan mungkin 70% pun enggak, karena kita menghadapi pandemi, terjadi *refocusing* anggaran dan sebagainya.

Nah, sekarang justru di akhir pemerintahan ini, menurut saya, semua kendala atau target yang tidak tercapai selama masa Covid itu harusnya *kan* ditumpahkan di sini, kita ngejar, Pak. Tapi ternyata logika itu enggak nyambung kali ini. Karena yang terjadi, semua kementerian dibabat habis semua anggarannya ya. Padahal kita tahu bahwa anggaran itu diperlukan untuk banyak hal, tidak saja supaya kementerian bisa mencapai, apa namanya, target-target dalam RPJMN, tetapi *kan* juga ini stimulus ekonomi, Pak. Stimulus ekonomi masyarakat, sektor riil.

Data perbankan menunjukkan, simpanan orang Indonesia 100 juta ke bawah, Pak, 80% menguap. Artinya, ada masalah *cash* buat masyarakat kita di bawah. Nah, kalau bukan, apa namanya, APBN yang bisa mendorong konsumsi di situ, dari mana lagi, Pak? Apa dari ekspor? Ini *kan* nanti hubungannya lama-lama ke daya beli dan seterusnya.

Nah, ini mungkin saya enggak tahu, *kan* Bapak dekat dengan presiden. Kemarin Pak Bahlil juga di sini mengeluh, *tapi* beliau menyalahkan Menteri Keuangan dan Bappenas. Nah, padahal saya berasumsi, Menteri Keuangan dan Bappenas itu *kan* ada bosnya. Artinya ada arahan dari pucuk pimpinan tertinggi untuk, apa namanya, kalkulasi bagi APBN yang akan datang. Nanti presiden akan pidato nota APBN tanggal 16 Agustus, kita dengar. Tetapi saya melihat ada yang *miss* pada logika penyusunan APBN pada tahun 2025 yang akan datang ini, itu satu hal.

Yang kedua, Pak. Ini saya ulang lagi, ada tiga hal yang akan saya ulang. Yang pertama, soal perjanjian dagang, Pak. Saya sangat berharap waktu yang tersedia sampai Oktober ini kita gunakan Pak untuk *me-review* semua perjanjian perdagangan, perjanjian ekonomi kawasan, dan sebagainya, untuk melihat *lesson learned* yang kita dapat, seberapa besar itu memberikan manfaat mendorong ekonomi kita, Pak. Apa hal-hal yang harus kita perbaiki, Pak, karena i kita tidak pernah membahas itu secara detail. Apakah kita perlu mendorong kementerian-kementerian lain kemudian misalnya, untuk ikut berpartisipasi memanfaatkan semua perjanjian-perjanjian internasional yang kita miliki?

Lalu yang kedua, lagi-lagi Pak, untuk kepentingan dapil saya dan 10 provinsi lain, tentang rumput laut, Pak. Rumput laut ini, Pak, sumbangannya untuk negara kita, Pak, kalau melihat data, itu berkontribusi 1,89 miliar dolar ya, tahun 2020 baru 275 juta dolar, 4 triliun, Pak. Sekarang kalau melihat data ini, ini yang nulis satu penelitian dari Griffith University, itu sumbangannya



ternyata 1,89 miliar US Dolar dari total 2,05 miliar dolar produksi budi daya laut setiap tahunnya. Ini urusan besar, bukan urusan kecil.

Ada pidato presiden yang mengatakan, bahwa akan melarang ekspor rumput laut, ya. Saya enggak tahu itu sudah jalan atau belum, kayaknya belum, tetapi implikasi dari pernyataan itu kemudian Pak, terjun bebas harga rumput laut, dari 18.000 sekarang Rp6.00. Untuk mereka bekerja *aja*, untuk budi daya itu enggak cukup Pak, menjerit semua, Pak. Ini ada 11 provinsi yang terdampak. Ini saya kira perlu, Pak. Saya tadi *ngomong* dengan Pak Sekretaris, waktu *konsinyering* saya juga sudah bilang, tolonglah perhatikan ini, kita perlu turun. Karena ternyata, rencana pemerintah untuk hilirisasi itu, itu mengganggu rantai pasok daripada budi daya ini, Pak. Kita enggak tahu apa penyebabnya. Bayangkan, *dulu* 50.000, turun 40.000, turun 20.000, turun 18, sekarang 6.000, Pak.

Saya kalau ke dapil, Pak, ini saja yang dikeluhkan orang-orang semua. Jadi, saya kira kita enggak bisa main-main soal soal rumput laut ini, Pak. Karena ini sudah hal yang sangat sangat penting buat kita semua. Karena kalau kita lihat Pak, itu yang namanya *Eucheuma Cottonii* itu Pak, potensinya di Indonesia mencapai 10 miliar US Dolar, Pak, per tahun. Dan kita pemasok 80% dari komoditas itu. Ini perlu menjadi perhatian kita, Pak.

Saya sudah ajak tadi Pak Sekretaris, ayolah kita main-main lihat ini urusan, karena urusannya besar menyangkut banyak sekali rakyat, Pak. Dan saya kira di Nunukan itu banyak juga rakyatnya PAN *tuh* sama di Tarakan, yang juga bekerja di sektor ini, Pak, ya. Selama ini mereka penyumbang ekonomi terbesar di Pulau Tarakan dan Pulau Nunukan.

Nah, kemudian perdagangan perbatasan. Ketika kita mau menyatakan membangun semua *border* kita, PLBN Pak, itu Malaysia langsung mengantisipasi, Pak. Mereka langsung bangun jalan ke perbatasan, bangun yang megah PLBN-nya. Tetapi sejak itu pula yang tadinya perdagangannya adalah perdagangan tradisional, kemudian mereka jadi dipersulit, Pak, berdagangnya. Karena mereka sudah punya PLBN, kita belum. Ada dua PLBN yang sampai sekarang belum diresmikan oleh Pak Presiden, padahal sudah selesai, PLBN Pulau Nunukan dan PLBN Labang.

Dulu ini perdagangan biasa, mereka enggak perlu paspor, Pak. Sekarang dengan adanya PLBN itu dan belum diresmikan, yang sulit rakyat kita untuk berdagang, Pak. Kalau mereka harus ke pusat kabupaten, Pak, biayanya luar biasa, Pak. Di sana orang cuma berkebun, tanam singkong, tanam apa, yang biasa, itu untuk makan sehari-hari. Kalau mereka harus ke, katakanlah di Nunukan harus ke Mansalong itu, itu bisa 4 jam, Pak. Biayanya untuk pulang pergi bisa 6 juta, Pak, padahal ke Malaysia mungkin cuma setengah jam.

Nah, ini tolong saya perhatiannya, Pak. Untuk daerah perbatasan itu, Pak, karena mereka itu, Pak, harusnya menjadi, apa namanya, *national pride*, bukan justru mereka yang terasing dan tersingkirkan. Kalau perjanjian kita



dengan Malaysia, itu berapa per orang, kalau enggak salah 200 dolar, maksimum. Manalah rakyat tiap hari mau beli, tiap minggu harus beli gula, beli, apa namanya, tabung gas, itu harus keluar untuk ongkos. Dan dari mana biaya *segitu*? Akhirnya pedagang, pedagang lalu mencekik harga, Pak. Satu tangki 12 kilogram itu LPG, Pak, bisa 1,8 juta, Pak. *Kan* tersiksa orang.

Jadi, saya berharap, Pak, tolong bantu kami juga, sampaikan kepada presiden, supaya PLBN kita itu segera diresmikan dan bagaimana masyarakat kita bisa berdagang dengan, dengan negara tetangga kita itu dengan lebih baik. Saya tunggu, Pak Sekretaris, kita jalan-jalan lihat rumput laut, Pak. Nanti ketemu rakyat kita di sana yang betul-betul menunggu, di Kalimantan Utara, Pak, Tarakan dan Nunukan, Pak. Kalau perlu saya mengajak Pak Zul juga ke sana, karena *dulu* menteri sebelumnya sudah janji-janji, *tapi* enggak, enggak datang juga, Pak. Saya yakin itu akan menjadi *legacy* yang sangat diingnat masyarakat Pak, untuk Bapak, kalau kita bisa selesaikan.

Makasih, Pak. Makasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, Pak Deddy.

Kita lanjut, berikut Pak Demer.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Terima kasih.

**Pimpinan serta Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Menteri beserta Pak Wamen,**

Pak Wamen ini, kira-kira kalau bisa *sih*, siapa pun menterinya, wamennya tetap. Apa itu?

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Udah tiga menteri.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Iya, iya, iya. Jadi.

Beserta jajaran Kementerian Perdagangan yang saya hormati,

Saya mungkin banyak hal kemarin yang dibicarakan oleh Pak Bahlil, yaitu tentang bagaimana investasi akan sulit, apa target investasi sulit



tercapai. Jadi, bicara tentang instrumen daripada pertumbuhan yang akan kita capai minimum 5% nanti untuk mencapai Indonesia Emas ke depan, tentu akan mengalami sedikit hambatan, termasuk juga di kementerian Bapak ini, yaitu persoalan nanti ekspor dan impor, Pak, salah satu daripada instrumen, apa, rumus daripada pertumbuhan.

Hal yang lain yang perlu kita perhatikan sebenarnya, Pak, bagaimana kita mendayagunakan kekuatan dalam negeri kita, pasar dalam negeri kita, untuk kita. Nah, ini kalau China sampai ke Facebook sampai ke WhatsApp itu di-*banned* oleh mereka *gitu*, sehingga kita juga agak kadang-kadang kelabakan juga kalau di China itu, Pak. Nah, di Indonesia salah satunya, Pak, saya melihat ini, kuota impor miras, minuman keras, Pak. Saya berharap Bapak mengeluarkan kebijakan untuk ada semacam TKDN, Pak, semacam TKDN kalau di Perindustrian itu, Pak. Jadi, mulai dikeluarkan seumpamanya, Pak ya, 10% dari kuota yang diberikan oleh Bapak untuk impor, itu mestinya mereka juga menjual minuman dalam negeri, Pak, sehingga benar-benar turis yang datang ke kita dan sebagainya tidak menjadi hanya menikmati minuman keras impor, Pak.

Nah, jadi saya berharap, saya berharap itu bisa, Pak, karena, enggak, kitakan *state interest*, Pak. Walaupun kita berbicara *free trade* dan sebagainya, buktinya Amerika mundur juga dari NAFTA, Pak. *Not American Free Trade* itu, dia paling *dulu* dia ngomongin *free trade*, *tapi* dia paling *dulu* mundur dari, apa, *free trade* itu sendiri, *gitu*. Yang penting kita lindungi *state interest* kita, apa yang menjadi *state interest* kita, kita jalani, Pak, seperti halnya China melakukan *state interest*-nya dengan mem-*banned* banyak hal untuk masuk ke China, *gitu*.

Kita juga bisa, Pak, kita mungkin tidak se-ekstrim mereka, *tapi* kita mungkin membuat semacam kayak TKDN, *gitu* Pak. Jadi, mereka kalau mereka jualan, apa, ngimpor 100 *gitu*, ya minimum dia memperlihatkan 10, apa, 10, dia sudah menjual produk dalam negeri, *gitu*. Karena produk dalam negeri ini bukan hanya dinikmati, miras ini tidak dinikmati oleh orang kita, Pak. Ini lebih banyak justru dinikmati oleh wisatawan kita sekarang ini. Jangan sampai kita banyak wisatawan, yang menikmati justru industri-industri internasional, Pak, apalagi sekarang dengan mudahnya, masuknya, karena, apa, bea masuknya juga tidak terlalu tinggi seperti dulu, sehingga ini lebih membanjiri negeri kita.

Harapan saya ini. Sehingga di samping kita mendongkrak daripada pertumbuhan industri kita, tentu juga ini menjadi substitusi impor, Pak. Ini banyak kelebihannya, Pak, jadinya, Pak. Kebetulan saya punya, ada pabriknya juga, Pak, *wine*, Pak. Jadi, dan saya tidak bisa menolak juga kalau seandainya itu, akibat daripada itu, naik, Pak, *gitu loh*, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Masalahnya belum ada oleh-olehnya, Pak.



F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Jadi, kalau memang itu bisa kita lakukan untuk negeri ini, ya tidak menolak juga kalau *wine* saya juga naik, pasarnya naik, jumlah omsetnya, *kan gitu*, Pak, ya. Jadi, itu harapan saya ke depan, Pak.

Dan ini mungkin masih banyak lagi, Pak, semacam impor-impor begini ini yang memerlukan kuota ini kalau bisa, mungkin harus dia mendirikan pabriknya di Indonesia atau dia memasarkan produk dalam negerinya, Pak. Seperti halnya dilakukan di China, Pak. Karena pasar kita katanya ke depan ini kita akan cukup beruntung punya *baby boomer* ini, Pak. Kita akan, ledakan penduduk ini yang orang, orang, apa namanya, yang sekarang negara-negara banyak kesulitan tentang penduduk, tentang pasarnya *gitu*, tentang faktor produksinya, tentang pasarnya. Kita beruntung, kita mempunyai faktor produksi, kita mempunyai pasar ke depan yang masih menjanjikan dalam dekade ini. Nah, kalau kita tidak baik-baik, ini dinikmati juga oleh orang lain.

Itu harapan saya dan saya berharap untuk persoalan *state interest* ini, saya yakin Pak Menteri akan berani untuk memberikan kebijakan itu, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, Pak Demer.

Kemudian, Bu Nevi Zuairina.

F-PKS (NEVI ZUAIRINA):

Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,
Pak Menteri,
Pak Wakil Menteri dan bersama jajaran,**

Yang pertama, yaitu berdasarkan data yang dimiliki Pak Menteri, manakah aktivitas perdagangan yang paling banyak, Pak, yang mendatangkan pemasukan untuk negara Indonesia? Perdagangan dalam negeri atau perdagangan luar negeri?

Lalu yang kedua, perlu adanya peningkatan konektivitas antar pulau dan mengembangkan pusat-pusat distribusi, apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk membantu agar lebih memudahkan dalam perdagangan antarwilayah atau perdagangan antar pulau? Bagaimana Pak Menteri koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, sehingga nantinya biaya logistik dalam perdagangan bisa diperkecil?



Yang ketiga, Pak Menteri, kegiatan apa saja dilakukan Kementerian Perdagangan dalam rangka pembinaan UMKM? Karena kita memiliki Kementerian Koperasi UMKM, agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam penggunaan anggaran pembinaan UMKM. Nah, sehingga kita memastikan bahwa UMKM yang dibina oleh Pak Menteri dan Kementerian Koperasi itu berbeda, Pak Menteri.

Yang ketiga, baru-baru ini Pak Menteri ada berita di media massa, di media massa tentang tertahannya peti kemas di pelabuhan, sehingga menjumpai Pak Menteri agar barang bisa cepat keluar dari pelabuhan. Ini masalahnya di mana, Pak Menteri? Ya atau ya mungkin apa masalah kurangnya koordinasi di lapangan, sehingga saya dengar sampai ada kena denda, Pak Menteri. Ya, walaupun ada kena denda, ini dibayarkan oleh pemerintah ya, jangan dibebankan oleh ke masyarakat.

Lalu terakhir, Pak Menteri, dengan *semakin* banyaknya perdagangan dilakukan melalui toko *online* dan *marketplace*, sangat memudahkan bagi konsumen untuk berbelanja, ditambah bagi harga yang sangat sangat murah. Kemajuan ini tentunya harus diantisipasi agar pelaku usaha dalam negeri tidak dirugikan. Bagaimana Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan dan pengaturan regulasi agar dengan semakin berkembangnya toko *online* dan *marketplace* tidak merugikan pengusaha lokal dikarenakan barang diperjualbelikan kebanyakan dari impor?

Terima kasih, Pak Menteri. Itu saja, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, *makasih* Bu Nevi.

Habis? Pak Adi mau? *Oke*, silakan Pak Adi.

F-PDIP (ADISATRYA SURYO SULISTO):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang kami hormati Pak Menteri,
Pak Wakil Menteri beserta jajaran, dan
Teman-teman Pimpinan, dan juga
Rekan-rekan Komisi VI yang saya hormati,**

Pertama, terkait anggaran, Pak Menteri, dari segi penyerapan, saya kira bagus. Beberapa tahun terakhir itu di atas 95% dan, apa namanya, menunjukkan *planning* dan *disbursement*-nya ini bagus sekali. Kita harapkan tahun-tahun ke depan juga bisa dijaga seperti ini. Tentunya, kita juga prihatin,



ini penurunan anggaran, walaupun ini terjadi di semua kementerian dan lembaga, dan kami sangat mendukung permintaan penambahan anggaran ya, dari Kementerian Perdagangan dan kita akan mendukung itu.

Baru-baru saja, Pak Menteri, kami mengadakan kunjungan ke Belanda waktu itu, kunjungan Komisi VI. Dan ada beberapa hal yang bisa menjadi, apa namanya, dikembangkan ke depan. Kami melihat, walaupun sekarang *trade surplus* kita dengan Belanda itu bagus ya, tapi masih banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan, terutama dari segi ekspor produk-produk makanan dan bumbu (*spices*). Tentu kita mempunyai *historical* yang panjang dengan Belanda. Dan di sana diaspora kita besar. Waktu itu disampaikan oleh Pak Dubes, hampir 10% dari total populasi. Jadi hampir 2 juta itu ada hubungannya dengan Indonesia. Dan ini jumlah restoran Indonesia terbanyak di luar Indonesia ada di Belanda, hampir 1.000 dan ini mempunyai potensi-potensi yang luar biasa.

Sementara dari segi diplomasi melalui makanan, ini kita masih kalah dibandingkan dengan Thailand ya, kalau kita bicara secara global. Nah, ini menurut saya menjadi peluang yang bagus ya untuk kita bisa mengekspor lebih banyak lagi produk-produk UKM kita, bukan hanya ke Belanda, tapi ke seluruh dunia ya. Dan dari informasi yang kami dapat juga, hasil diskusi di sana, itu banyak kemudahan-kemudahan yang mungkin bisa kita perjuangkan untuk para pelaku UKM, mengekspor produknya.

Saya mendengar kalau di Thailand ini, mereka dari segi logistiknya itu bisa diberi banyak kemudahan oleh *airlines*-nya. Nah, mungkin Pak Menteri juga, kita bisa bekerja sama dengan BUMN untuk lebih mempermudah pengiriman barang bagi UKM, fasilitas-fasilitas khusus yang bisa menambah daya saing produk-produk UKM kita di luar negeri ya. Nah itu, apa namanya, pelajaran-pelajaran yang kami dapat dari kunjungan ke Belanda kemarin.

Selain itu, KBRI, saya melihat juga sangat serius untuk mengembangkan potensi produk Indonesia di Amsterdam. Mereka sudah mengkonversi, yang dulu-nya Konjen kita di sana menjadi *Indonesia House* di Amsterdam. Ini juga bisa dipergunakan untuk promosi-promosi dagang ya. Makanya saya sangat senang ini, ada program juga, peningkatan peran perwakilan perdagangan kita di luar negeri untuk promosi dagang, *market intelligence*, bisnis forum, dan sebagainya. Ini sangat-sangat penting menurut kami untuk meningkatkan ekspor kita ke depan, khususnya produk-produk UKM. Mungkin itu Pimpinan, dari kami.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,



Sekarang kita masuk ke meja Pimpinan, Pak Aria Bima.

WAKIL KETUA (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Martin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Kawan-kawan Pimpinan Komisi VI,
Pak Menteri Perdagangan yang saya hormati, beserta
Seluruh jajarannya,**

Memang kalau kita lihat di pagu indikatif Kementerian Perdagangan, terus melorot *aja* ini, dari 21, 22, 23 naik dikit, 24 ke 25. Nah, politik anggaran yang kita terus hitung adalah antara *cost* rasio yang kita keluarkan di tiap kementerian, *kan benefit* selalu kita kaitkan dengan peningkatan PDB berapa sebenarnya masing-masing kementerian itu ikut menyumbangkan berbagai hal yang terkait dengan investasi, peningkatan konsumsi, juga peningkatan ekspor, pengurangan impor, dan yang lain-lainnya.

Nah, kita melihat bahwa Kementerian Perdagangan di dalam proses peningkatan PDB yang selalu kita cermati itu, tetap bagaimana peningkatan ekspor ini perlu di dipercepat, dipacu dengan berbagai aturan-aturan dan bagaimana memitigasi berbagai persyaratan-persyaratan yang ada di masing-masing daerah sekarang ini, dengan digitalisasi perdagangan yang saat ini luar biasa saya melihat, dari, misalnya dari Padang, dari NTB, dari kain NTT, itu terjadi perputaran yang cukup menarik, ya.

Memang belum ada *marketplace* dari masing-masing dinas, masih *person to person* dengan diaspora kita yang menjadi *marketer-marketer* di luar, ini, ini terjadi ya, entah yang di Afrika, yang di Asia, di Eropa, itu terjadi. Nah, saya pikir prasyarat-prasyarat objektif yang sekarang terjadi yang ada, itu sangat, sangat bisa kita pacu untuk peningkatan ekspor kita ya, atas inisiatif kreativitas dari masyarakat yang ada. Kita berharap, ini penting, terutama di daerah bagaimana koordinasi dengan para dinas di daerah.

Salah satu contoh di dapil saya, begitu difasilitasi oleh BNI Xpora, BNI Xpora itu punya *kayak* semacam *clearing house* begitu, di situ banyak *zoom-zoom* dari para para diaspora kita yang di luar, di Thailand, di Jepang, kemudian dari BNI juga ada yang langsung di produsen, dipertemukan antara *buyer* dengan produsen lewat BNI Xpora, itu saya lihat peningkatan ekspor di daerah Sukoharjo, di daerah Boyolali, termasuk makanan-makanan, misalnya jamu herbal minuman dari Sukoharjo, itu antara *buyer* dan *user* itu ketemu dengan sistem digitalisasi yang saat ini ada.

Saya melihat kemarin kita kunjungan ke *Italy* memang membentuk satu, apa, *merchandise* untuk memamerkan barang kita itu juga satu yang yang, yang, yang langsung mempertemukan barang itu dengan penjual. Tapi



di era sekarang, saya melihat pasar kita yang terbuka terutama memanfaatkan *marketer-marketer* diaspora kita ada yang memang tinggal, ada yang memang belajar, ada yang memang jadi TKI, ada yang macam-macam. Ini ini seperti apa? Misalnya waktu itu saya menunggu asosiasi Muslim Amerika membutuhkan beras organik yang di sana itu sangat mudah dan sangat cepat untuk bisa laku, tapi dia menyampaikan kendalanya adalah belum ada sistem keuangan yang bisa dipinjam dari bank kita untuk usaha di sana, itu yang pertama. Yang kedua, BPOM-nya untuk masuk di sana itu kesulitan ya. Nah, ini, ini yang semacam-secam ini ,akhirnya di di situ saya dengarkan, terjadi komunikasi untuk mempercepat bagaimana beras organik ini dibantu untuk segera cepat masuk ke Amerika, juga manggis di, di, di Australia.

Saya melihat betapa sekarang dengan *size* pasar yang demikian besar dengan digitalisasi ini, perlu ditangkap sebagai *opportunity* antara Kementerian Perdagangan di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, yang mana mereka masih tidak ter-*organize* ya, tidak dalam satu *marketplace*. Misalnya *furniture-furniture* semua, makanan-makanan semua, batik-batik semua, *gitu kan*, ini masih satu per satu ya.

Saya saya membayangkan, bisa enggak dianggarkan, supaya ada ada literasi buat masyarakat maupun dinas-dinas untuk mengkoordinasikan berbagai produk-produk ekspor kita yang yang dulu kita pakai pameran, kita membawa delegasi, sewa sesi tempat, terus kita pameran, itu baik, tetap saat ini tetap perlu itu itu. Tapi era saat ini saya kira bagaimana mempertemukan penjual sama barang dengan *role model* BNI Xpora ini penting, Pak. Cuma dinas-dinas Perdagangan di daerah tidak ter-*connect* dengan ini, Pak, ya. Dan diaspora kita sekarang di luar dengan gen Z-nya bisa jualan berbagai produk yang ada, tapi dalam skala kecil, itu pun juga perlu dibantu untuk pabean dan bea cukainya Pak, itu yang pertama.

Yang kedua, tentang masalah literasi kripto, aset kripto. Wah sekarang, duit di bawah itu bisa ketarik karena kripto, sama, sama yang yang ilegal itu judi *online*, itu bermain dari 5.000, 10.000, maka saya sepakat dengan program Kementerian Perdagangan tentang edukasi dan pelatihan yang menyangkut peningkatan pemahaman masyarakat tentang aset kripto dan meminimalisir risiko penipuan. Ini langsung harus di, ditangani, kalau enggak salah dengan Bappebti ya, mungkin?

Nah, yang ketipu banyak, Pak, yang untung-untungan lumayan ya, tapi coba kalau kita pulang ke daerah, pada mau jujur gocekan *gitu, guyon maton*, pada betul dibuka. Wah iya, Pak, saya lepas sekian, sekian, sekian ya. Nilainya itu dari yang kecil sampai yang gede. Ini mohon di di dicermati betul, Bappebti, bagaimana untuk literasi catatan pelanggan saat ini, aset untuk transaksi ini, 100, *sorry*, sekitar di atas 100 triliun, Pak, yang sudah berputar sekarang ini. Itu mohon dicermati bagaimana literasinya dan Bappebti perlu lebih proaktif masuknya kripto ini ke. Kalau *dulu* ada Capjikia, ada Nalo, ada Buntut, itu kalau judi di situ, itu beredarnya itu bandarnya juga di sekitar RT, RW, kelurahan, dan kecamatan itu, Pak. Duit yang dapat sama yang, yang



tidak dapat, itu tetap berputar di bawah, Pak. Tapi kalau ini kripto, kemudian judi *online*, itu tarik ke Jakarta Pak, ya. Kayak SDSB dulu tapi enggak jelas arahnya ke mana, ya, saya bicara dari yang ada *aja*. Capjikia dilarang keras, Pak, dikejar-kejar Capjikia sekarang itu, yang sehari buka delapan kali itu bandarnya kejar-kejar, tapi semua main ke kripto sama judi *online*.

Kemudian, terkait dengan, masih Badan Pengawas Perdagangan Berjangka *Komoditi* berkomitmen untuk terus mendorong implementasi bursa minyak sawit. Pak Menteri, kita ada Panja komoditas, sampai hari ini belum ada *way out*. Kita *udah* mengundang dari kalangan intelektual, praktisi, kemudian dari para pelaku, untuk kita bikin indeks harga komoditas nasional, itu sama sekali tidak ada narasi untuk yakin bahwa kita mampu. Kita mempunyai, masuk di perut bumi kita punya sumber daya mineral, kita masuk ke laut punya ikan, kita masuk ke sumber daya pertanian dan perkebunan, kita punya. Jadi orang jual kakao, orang jual cokelat, orang jual cengkeh, itu pengumpul, itu langsung datang ke petani.

Nah, kemarin dalam bursa itu kita punya ingin, punya harga indeks komoditas nasional, yang mana prasyarat-prasyarat subjektif dan objektif itu kita cari satu persatu. Kenapa kita punya sawit, ya, tapi CPO tidak atas indeks harga CPO nasional kita? Ya. Malaysia punya, kenapa kakao tidak? Kenapa cokelat tidak? Kenapa batu bara tidak? Kenapa nikel tidak? Ya. Kenapa timah tidak? Sementara itu kita punya semua.

Nah, saya berharap harus mulai di dipikirkan, kenapa tidak? Apakah ini konspirasi kepentingan kapitalisme global dengan regulasi global yang menekan kita untuk tidak bisa bergerak dengan berbagai kekayaan sumber daya alam kita? Pasar buktinya nyata *kok*, pada saat CPO kita tutup ekspornya, mereka pada lari ke Arbitrase Nasional. Pada saat kita tutup nikel kita, pada Arbitrase. Terus dengan demikian, pasar itu jelas.

Beberapa narasumber mengatakan, indeks itu hanya bisa ditentukan kalau kita punya informasi dan data, tidak hanya sumber daripada *resources*-nya tapi juga pasar. Antara *resources* dan pasar inilah, indeks harga komoditas. Nah saya berharap, saya mewacanakan ini menjadi satu pemikiran yang harus kita selesaikan soal Undang-Undang Perdagangan kita, kenapa negara sebesar ini dengan pasar hampir 280 juta, dengan berbagai kekayaan sumber, berbagai kekayaan komoditas kita, kita tidak mampu menentukan harga, sehingga harga di tingkat hulu, entah itu petani, entah itu nelayan, itu enggak akan bisa ngerti. Jagung kita nanti pada saat nanam itu harga 3 bulan lagi berapa dan pasarnya siapa.

Kita pun kalau di pasar fisik, pasar lelang, kita ada, di Magelang pasar lelang itu ada, tapi masa kita juga enggak bisa menentukan petani untuk menjadi *price maker* pada saat dia menanam, kira-kira 3 bulan lagi berapa. Ini satu yang perlu saya sampaikan.

Kemudian, yang terkait dengan apresiasi untuk Kementerian Perdagangan, mencatat transaksi potensi sebesar 963.000 US Dolar atau



senilai 15,5 saat mengikuti pameran di, kemarin, Pak, ya, di Osaka ya. Kalau situasi yang mengkhawatirkan, kalau kita baca jurnal beberapa jurnal internasional, yaitu situasi kondisi keuangan di Amerika yang terus meningkatkan suku bunga, kemudian juga kalkulasi Presiden Trump kalau menang itu terjadi kepentingan nasional, *interest* Amerika yang *semakin* menguat, krisis ekonomi China, kemudian Timur Tengah antara Iran dan Israel yang enggak selesai-selesai kalau ini terjadi, ada beberapa hal yang tentunya Pak Menteri disinggung mengenai terigu, bahan baku pupuk, minyak, dan beberapa impor kita dari Eropa itu, jelas akan terganggu.

Nah, juga antisipasi kalau kemudian dolar ini tidak, tidak terkendali sampai 17 ke 18, yang sangat jauh dari asumsi APBN kita. Tentu perdagangan-perdagangan kita ini akan mengalami berbagai goncangan atau ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand*. Maka, saya berharap, *uncertainty*, dalam kondisi yang tidak menentu semacam itu, perlu opsional-opsional kalau itu sampai terjadi, dalam keadaan pemerintahan transisi, dalam keadaan pergantian presiden dan kementerian. Karena situasi itu kurang lebih baru akan terjadi sekitar Oktober, November, Desember. Antisipasi sis krisis dunia yang variabelnya tidak hanya satu, tapi dua, tiga sampai empat, ini yang saya kira kita perlu pikirkan dan moga-moga Pak Menteri juga tetap menjadi Menteri Perdagangan, meleset-melesetnya Menko, *kan gitu*. Itu isunya di antara para partai pengusung Pak Prabowo.

Tentang hal yang menyangkut internasional tadi, Pak Menteri, Amerika Serikat dan Tiongkok masih terlibat perang dagang yang berkepanjangan, juga Uni Eropa, minyak dunia saya sampaikan tadi. Nah, perizinan ekspor yang sudah *single window* atau sudah digitalisasi kita harapkan, *udahlah* untuk ekspor saat ini agak dipermudah-mudah dikitlah ya, yang dipersulit impornya *ajalah*, ya. Jangan terlalu, saya sudah *ngomong* sama BSN, saya sudah *ngomong* sama Sucofindo ya, situasi kayak *gini*, kecuali ada yang menyangkut persoalan-persoalan soal, misalnya soal, saya setuju itu kayu segala macam, yang memang, *tapi* kalau barang-barang yang kira-kira sudah punya *buyer* dan *user* untuk bisa diekspor, mohon-mohon betul untuk betul dibantu supaya mempercepat.

Kemudian, masyarakat hari ini, perlu saya sampaikan, untuk cabai masih tinggi, Pak Menteri, di beberapa daerah, terutama cabai rawit dan cabai merah. Demikian juga bawang, harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan. Beras relatif stabil, namun beberapa jenis mengalami kenaikan. Telur mengalami kenaikan di daerah. Daging ayam, ayam broiler dan ayam kampung mengalami kenaikan. Minyak goreng relatif stabil ya, setelah mengalami kenaikan beberapa bulan kemarin ya, penyebabnya masih masalah klasik, biaya logistik, seperti transportasi dan bahan bakar yang itu tentu dapat meningkatkan harga pangan. Permintaan yang tinggi mungkin menjelang Lebaran, apakah ini temporer? Ada yang *temporer*, ada yang *temporemya* itu tidak wajar, itu agak terlalu lama.

Saya kira itu, Pak Menteri, di dalam politik anggaran kita. Sebenarnya Kementerian ini *key performance indicator*-nya tidak persoalan berapa



besarnya dan berapa capaian penyerapannya, tapi kebijakan-kebijakan yang langsung memberikan dukungan pada peningkatan PDB. Dan ini perlu dicermati dan itu hanya di, Pak Menteri pegang di hilirnya. Sementara persoalan hulu ini bentuk koordinasi yang sangat kuat dengan ego sektoral, dengan Kementerian Kelautan, dengan Kementerian Pertanian, dengan Kementerian Perindustrian, yang banyak hal, mohon maaf, sudah sama Pak Menteri, karena Pak Menteri banyak jadi menteri, jadi saya 20 tahun di sini, masih jalan-jalan di tempat *aja*, Pak Menteri.

Moga-moga 5 tahun ke depan, 25 tahun ke depan ya *kan*, saya enggak pindah juga komisinya ya di sini *aja*, Pak Menteri duduk di situ itu, Pak. Itu *contribute* untuk perdagangan ke depan tentunya akan lebih baik lagi. Dan mengenai anggaran, nasibnya sama, Pak Menteri, semua kepotong antara 20 sampai 30% ya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, Pak Aria Bima.

Sebelum saya kembalikan ke Pak Menteri, ada sedikit dari saya, Pak Menteri. Memang turunnya anggaran ini agak mengagetkan *nih* Pak buat kami juga. Pak Menteri, pagu indikatifnya masih mending *nih* turunnya 15,67%, tiap tahun turun. Kemarin Pak Bahlil di sini, Pak Menteri, anggarannya turun 45%. Pak Erick juga turun 18%. Jadi saya bingung juga ini, menteri-menteri kita di Komisi VI ini sebenarnya cukup keren-keren *loh*, lingkaran *elit* kekuasaan. Turun semua.

Nah, yang menarik, Pak, tidak ada yang tahu kenapa anggaran ini, pagu indikatifnya turunnya sampai sedemikian drastis. Nah, kemarin saya baca dari Pak Menteri Bappenas menanggapi omongan Pak Bahlil pada raker seperti ini, mengatakan bahwa setiap kementerian/lembaga itu sekarang ada evaluasi untuk setiap program pemerintah dengan standar *governance risk compliance*. Ini yang menjadi penentu anggaran itu naik atau turun. *Loh* kalau ini penyebabnya, apa yang kemudian dari sisi GRC ini, dari Kementerian Perdagangan, faktor apa?

Kalau kita lihat, *governance risk compliance*, saya juga enggak paham. Karena lucunya, setiap kementerian di Komisi VI itu, ini *kan* yang komisi di DPR ini yang membahas tentang pendapatan negara itukan enggak banyak ya. Komisi VI salah satunya. Jadi, target investasinya Pak Bahlil naik, *dividen*-nya Pak Erick naik, anggarannya turun. Bapak juga neraca perdagangan naik, anggarannya turun.

Nah, jadi ini saya pikir, saya juga enggak paham, Pak Menteri, tapi mohon di, apa namanya, dijawab, kenapa bisa terjadi seperti ini? Di komisi-komisi lain juga banyak yang turun dengan angka yang 30-an%, Pak. Ya ini *kan* ada, jadi bisa, apa istilahnya, *prejudice gitu* ya. Apa ada sektor lain yang menyedot? Atau pendapatan negaranya turun? Nah, itu menurut saya penting untuk kita tahu, *gitu*.

Nah, kalau kemarin Pak Bahlil itu kemudian menurunkan target investasinya di 2025 dari 1.800 triliun hanya menjadi 800 triliun karena anggarannya turun, apa ada dampak serupa terhadap target-target di Kemendag dengan turunnya anggaran ini, Pak Menteri? Itu dari sisi saya, kalau soal evaluasi dan realisasi, saya apresiasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.

Yang kedua, saya mau mem-*follow up*, Pak. Memang ini pada waktu itu program dengan Kementerian Perdagangan sebelum Bapak menjadi menteri, terkait di Dapil sayam untuk komoditas kemenyan. Jadi kami pada waktu itu dengan Pak Kasan ya, waktu itu masih Dirjen PEN. Kami sudah lakukan FGD di sana. Dan kami mendapati, bahwa sebenarnya ini agak, apa ya, luar biasa jahanam juga nih komoditas kemenyan ini. Harganya sangat murah di tingkat petani, tapi ternyata sangat tinggi di tingkat pedagang, bahkan di pasar internasional, Pak.

Nah, jadi kalau kita, apa, lihat, itu tata niaganya memang perlu diberi perhatian, Pak, karena di sana cukup banyak petani untuk kemenyan, kemenyan Toba itu dan nilainya itu sebenarnya triliunan. Ini kalau kita hitung, Pak, dari di Sumut saja ya, di Sumut saja, dari 23.000 *hektar* dengan produksi getah sebanyak 833, 30, 8.332 ton, potensi pasarnya itu mencapai 2 triliun lebih. Nah, ini menurut saya kita harus kasih perhatian dan pada waktu itu Kemendag juga sudah turun, tahun 2020, bersama-sama dengan saya. Kalau bisa ini juga kita perhatikan untuk ke depan.

Karena ini tergan, apa, terkait juga dengan masyarakat adat, Pak Menteri. Jadi kalau mereka disuruh pindah tanaman juga berat, *gitu*. Mereka sudah melakukan ini tradisi selama mungkin puluhan tahun. Kemenyan, Mas Bimo.

WAKIL KETUA (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tanamannya apa?

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pohon kemenyan, pohon kemenyan, pohon kemenyan. Itu kalau di, iya baru dengar *kan*? Itu kalau di pasar internasional tinggi sekali harganya, mahal sekali pohon kemenyan.



Nah, itu mungkin saya kasih *reminder* lagi kepada Kemendag, karena waktu itu kita sudah sama-sama ke sana, jadi supaya bisa kita jawab *problem* komoditas kemenyan ini.

Terima kasih, Pak Menteri yang saya hormati, saya kembalikan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan tanggapan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Saya akan jawab beberapa, mungkin nanti kalau yang lain bisa dengan tertulis. Yang pertama, tadi menarik Pak Harris, mana ada Pak Harris? Apakah mungkin kita ini jadi negara maju 2045 atau tidak? Pak Mendag, kata Pak Harris kalau kita mau jadi negara maju, maka PDB-nya itu harus 30.000, kalau 30.000 maka pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7%, saya mengatakan, "Bisa, asal kita mau", Pak.

Ada kata kuncinya, Pak, di kolaborasi, kerja sama, kita mesti satu, Pak, kalau kita enggak satu ya enggak bisa, *tapi* bisa, *gitu*. Saya sudah pikirkan Pak 2 tahun, jadi hampir 2 tahun jadi Mendag, bisa. Dan pertumbuhan ekonominya bisa 7%, bisa 7%, bisa sampai 8%, *gitu* ya, ya tapi menjelaskannya panjang, itu *aja* kira-kira, kalau ditanya bisa? Bisa, ya. Bahkan Pak Prabowo sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi ke 7 sampai 8 ya, 7-8 dan saya rasa itu bisa.

Saya kasih contoh *aja*, Pak, begini. Dulu, Pak, Eropa itu, kelahi terus, karena penduduknya padat, dia enggak keluar, ya kelahi terus. Apa yang terjadi? Dia memperluas, Pak, wilayah, ketemu benua Amerika, sampai ke Indonesia, sampai ke Afrika, sampai ke latin Amerika. Yakan? Akhirnya dia jadi jaya *kan*? Kita Pak, misalnya ya IKN saja, wah itu kita *kan* ributnya minta ampun.

Bapak-bapak bayangkan, 60% manusia itu di Jawa, Pak. Jawa ini kapalnya kecil. Bapak tahu itu polusi, kalau lari bukan sehat, Pak, karena di atas harus 200. Singapura itu 50, Pak, polusinya, 200 itu, Pak, bisa menyebabkan kanker. Bekasi lebih tinggi lagi, bukan lebih rendah. Karena apa? Saking padatnya, Pak.

Saya kalau Bali itu, dulu saya menentang Bali apa, Bali Utara namanya ya, akan dibikin bandara, saya enggak setuju. Karena menurut saya, yang di sini *udah*, bebannya *udah* lebih, jangan sampai barat, Bali jadi barat, barat jadi Bali, Pak, itu, saya menentang *dulu*.

Nah, kita in,i Pak, punya Kalimantan, punya Papua, masa depan kita, itu masa depan kita, Pak. Kalau kita mau swasembada pangan, kalau kita



mau swasembada beras, swasembada gula, jagung, segala macam itu, ya itu tempatnya ada, Papua dan Kalimantan. *Loh* kalau kita *biarin*, kita terus mau di Jawa terus, Pak. Jawa, Sumatera, Kalimantan, enggak mu, ya, Jawa, Sumatera dan lain, enggak mungkin, penuh. Jawa ini mau tambah tambah area tebu, enggak mungkin, Pak, yang ada kebun tebu pindah jadi rumah, yang ada sawah jadi rumah, ada, itu maksud saya.

Kalau kita bisa satu, ayo. Nanti ribut sedikit dari Papua, wah ini hutan adat, terus kita berhenti, enggak lagi. Saya pernah ngalamin. Dulu saya waktu Menhut mengembangkan tebu. Wah, saya tiap hari, 72 hari di demo, 72 hari di demo, Pak. Tambah NGO-NGO yang lebih barat dari barat, padahal orang kita, habis *ngantemi* kita, itu. *Lah* kalau Papua kita *biarin*, Kalimantan Timur yang begitu luas kita *biarin*, *kan* kita sia-sia, mubazir, Pak, nanti malah mereka minta lepas, iya. Coba kalau kita berdayakan, *gitu*.

Ini satu contoh, Pak, bahwa kita bisa. Saya ditanya, "Bisa enggak swasembada pangan"? "Bisa". "Berapa lama? 5 tahun?" "Kurang dari 5 tahun, tapi asal kita mau", *begitu*. Itu Pak, anu, Pak Harris.

Terus, nah ini penting ini, Permendag 8 kok berubah-ubah terus, *tuh* nasibnya Mendag begitu, Pak. Itu nasib Kemendag itu *resiko* jabatan. Cabai mahal yang dimaki saya, Pak, enggak apa-apa, *resiko* jabatan. Telur mahal atau telur enggak ada, yang dimaki Mendag, enggak apa-apa itu *resiko* jabatan, saya terima, tapi yang penting Komisi VI jangan salah paham, itu yang yang saya minta, jangan sampai teman DPR salah paham juga, *wah* repot saya.

Jadi Pak, salah satu tadi kalau kita mau maju. Saya ini termasuk orang yang enggak suka impor, Pak. Iya karena saya ini pengalaman ya, saya ada industri kecil, saya ada manufaktur, jadi saya itu enggak suka sebetulnya impor. Oleh karena itulah, Pak, idenya pertama itu, saya tadi awal-awal rapat di sini, teman-teman yang suruh, ini impor kenapa terhambat-terhambat, saya dimarahi, saya menyampaikan pikiran-pikiran saya. Dan pada waktu itu, saya *alhamdulillah*, Pak Jokowi setuju. "Pak, kalau begini ceritanya kita enggak bisa berkembang. Oleh karena itu, impor harus dibatasi", maka namanya dikenallah, impor harus dikendalikan, perintah Pak Jokowi.

Mulai dari *pass border*, saya *rubah* jadi *border*, setuju presiden, wah saya senangnya minta ampun. Dulu barang itu bablas saja, Pak, enggak lewat, enggak lewat Bea Cukai lagi, Pak. Itu Kemendag tinggal ngecek di mana? Di ruko, di mana *gitu* ya, ya, kita enggak mungkin sudah, itu. Dari satu sisi berhasil, dari *pass border* jadi *border*, perintah presiden, kendalikan, lahirlah Permendag 36. Saya senang, Pak, itu, senang saya.

Nah, Permandag 36 itu isinya di kepentingan-kepentingan lain masuk, antara lain misalnya, contoh, itu 36 juga ya soal PMI ya? Nah, PMI itu rapat, minta rapat, PMI yang melangsungkan rapat, rapat dengan presiden, saya datang, minta agar, agar PMI itu dibebaskan masuk barangnya. Rapat memutuskan, termasuk PMI-nya. Kepala PMI memang dia yang usul rapat,



disepakatinya 1.500, itu enggak usah, apa namanya, bebas pajak, tapi dibagi 3, 500, 500, 500. Kumpul mereka, Pak, di yang rapat *gini* mesti Menko, mesti Menko *kan*, kumpul.

Katanya bea cukai bingung, 500 dolar itu barangnya terlalu dikit, apa *aja*? Maka disepakatilah jumlah barangnya 50 lebih. Jadi, sebetulnya membela PMI ini, 50, 50 macam, 50 *item*, sini 500 itu. Jadi, lebih banyak sebetulnya, agar lebih banyak barang-barang itu masuk di sini. Tapi dalam pelaksanaannya, masuklah Permendag, Pak, ceritanya *dulu* nih, jadilah Permendag. Saya tanya, sama disusun sama teman-teman, "Ini apa *kok* jadi begini?" "Ini Pak permintaan rapat di Menko ya, termasuk PMI-nya datang, di 500 dolar itu *item*-nya apa saja? Ketemu 56", 56 ya? 56 *item* ya, termasuk Bea Cukai semua minta, lahirlah Permendag nomor berapa *tuh*? 36 jadi, 36 jadi berapa? Permendag 36 jadi Permendag? 7. Nah, bentar, 36.

Tapi kenyataannya, Pak, begitu itu Pemendag jadi, Bea Cukai bilang, "Kami enggak enggak punya waktu meriksa satu-satu". Nah, saya bilang "Kenapa enggak kalau enggak terlarang dikeluarkan *aja*?". Wah ini dari PMI, *kan* enggak ada obat terlarang, ya sudah *gitu loh*. "Oh enggak bisa, Pak, harus diproses satu-satu". Nah itu, contoh bisa kerja sama apa tidak? Karena meriksa satu-satu Pak, ya numpuklah, enggak bisa keluar *tuh* barang, ngamuk yang namanya PMI, karena ngamuk PMI, "*Gimana?* Ini enggak bisa dikeluarin?", "Enggak bisa", ya *rubah*, kitakan harus bela PMI, ternyata niat baik *kan* enggak cukup, *rubah* lagi, Pak, *rubah* lagi, kalau enggak, di situ ratusan kontainer.

Jadi, Permendag itu memang sarana untuk impor-ekspor *kan*, ada di tempat saya, tapi ini sebetulnya bukan urusan saya, ini urusannya Bea Cukai dengan urusan PMI, tapi bukan urusan kita, tapi karena ekspor-impor, rumahnya ada di situ, masuk situ-keluar situ, jelas Pak ya. Jadi *rubah*-lah 36 jadi Permendag Nomor 7. Urusan Kemendag bukan? Enggak, itu urusan PMI bersama Bea Cukai. Jelas, Pak, ya? Satu.

Dua, dari *border* eh *pass border* menjadi *border*, wah itu perjuangan yang panjang, *gitu*. Kata Perindustrian, "Pak, ini kalau ini untuk memperketat, mengendalikan barang-barang, harus ada Pertek". *Oke*, ini untuk melindungi dalam negeri? Betul Pak. *Oke* setuju, saya *kan* begitu semangatnya. Lahirlah Pertek (Pertimbangan Teknis) *tuh* macam-macam, ya macam ya. *Udah* saya pikir *udah* senang ini, Pak, untuk melindungi UKM, macam-macam, enggak gampanglah orang masuk barang kita, karena kata presiden "kendalikan".

Saya berangkat *tuh* ikut APEC, APEC penting, karena 72% *market share* dagang kita ada di APEC, ya. Ada Menteri Perdagangan Amerika, Tiongkok, semua pada datang. Jauh, Pak, di Peru, perjalanan saja 4 hari, saya pergi. Saya lagi sidang, telepon sama Pak Menko, "Itu barang di Priuk numpuk ribuan, tujuh, berapa? 26.000 kontainer", bayangin, Pak, *tuh*. 7000 Surabaya. "Kenapa katanya?" "Ini Perteknya belum kelar, presiden marah, *rubah* Permendag". Nah, saya ini Menteri, Pak, siap, itu. Kata Pak Menko, kalau Pak Mendag enggak ada, *kan* anunya, pelaksana tugasnya Pak Menko



kan “Saya aja yang tanda tangan”, “Jangan, Pak, saya Mendagnya, saya yang *teken* kalau peraturan Menteri Perdagangan”, Kirimlah pakai, apa namanya *tuh*, pakai digital, jadi saya tanda tangan.

Jadi, Pak, semangat semangat tadi yang menyala-nyala itu, itu enggak cukup memang, tergantung kepada kerja sama dan kesiapan kita, kesiapan kita, Pak, itu. Jadi kalau kita tidak siap ya itu, itu yang terjadi. Maka, berubahlah Permendag, Pertek itu urusan Perindustrian, bukan urusan saya, tapi karena ada impornya, masuk ke Permendag ya. Saya lagi di luar, rapat kabinet, Pak Menko dan juga presiden dan Menteri Keuangan “Hapuskan Pertek”, ya sudah. Saya bilang “Enggak, enggak bisa tunggu? “Soalnya sudah ada putusan rapatnya, sudah ada tanda tangan Bapak”. Sudah, saya *teken*. Jadilah Permendag. Tapi masih ada, masih ada, tadinya barang-barang itu *pass border*, sekarang sudah *border*. Ya masih ada kita untuk memeriksa sebetulnya, masih ada jalur untuk mengendalikan, ada.

Yang kedua, dia harus disurvei oleh, apa namanya, Sucofindo Surveyor, di sana itu ya. Ini barang-barang ini, kira-kira bakal *anu* enggak, sesuai dengan dengan apa yang menjadi yang, yang, yang tertulis dengan apa yang akan dimasukkan, jadi masih ada dua, ya.

Dan yang ketiga, Pak, itu kalau tekstil masih Pertek, Pak. Jadi, kalau tekstil kita tutup, jangan disalahkan Permendag 8, belum tentu. Karena TPT itu masih ada pertimbangan teknis dari produsen, enggak dihapus, termasuk baja, itu salah satu yang masih bertahan, enggak *dirubah* dalam Permandag Nomor 8. *Hah*, TPT?

F-PDIP (Ir. HARRIS TURINO, M.Si., M.M.):

Izin, Pimpinan.

Jadi untuk TPT tekstil, produk tekstil masih ada Pertek?

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Masih, masih Pertek. Jadi besi baja, TPT, masih, Pak. Jadi kalau tutup, jangan salah, *gitu*. Karena begini, Pak, kadang-kadang kita juga semangat tinggi untuk melindungi kita, tapi kadang-kadang memang teknologikan enggak bisa kita lawan juga. Contoh misalnya ya, contoh ya, misalnya Starlink masuk, ya pasti habis, Pak, BTS-BTS. Starlink enggak perlu kabel, kita larang, kita mau larang sampai kapan? Kita larang juga, orang bisa pakai bisa, *gitu loh*, Pak. Jadi, memang sebetulnya ya itulah tugas kita memang, berlomba-lomba, kita lindungi tapi mau berapa lama? *Kan* pada akhirnya tergantung juga kepada produktivitas *gitu*, itu lainnya bisa.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):



Pimpinan, dikit *aja*, Pak, saya-saya hanya hanya menanyakan *aja*, itu kayak Permendag.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Bentar dulu Pak, bentar dulu, bentar dulu, sebelum saya lupa.

Tadi dari Bapak yang peringatan untuk PPI, sudah kita ingatkan, maka kami WTP. Kalau diperingatkan enggak ditegur, enggak bisa WTP, Pak. Jadi, artinya yang peringat PPI tadi sudah saya laksanakan, karena semua sudah laksanakan, semua sudah dilaksanakan, masa, maka kita bisa, BPK itu menyatakan kita WTP. Tapi kalau ada catatan-catatan dari BPK yang kita tidak lanjut, pasti kita, namanya apa catatan itu? WDP. Tapi kalau WTP, catatan-catatan yang diberikan oleh BPK pasti kami sudah tindak lanjut semuanya, maka dia bisa ngasih kita WTP. Tapi kalau tidak ditindaklanjuti, dia menjadi WDP, Pak. Kalau diabaikan, dia menjadi apa namanya *tuh, disclaimer*. Nah itu kira-kira, itu Pak, kira-kira.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Kait, kaitan yang tadikan, Permendagri 7, 8 itu *kan*, yang pertama 36, terus.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Tujuh itu sebetulnya khusus PMI.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Ya, 7 terus 8 *kan* juga ada "Perubahan atas", itu *kan* begitu *kan*, itu *kan* waktunya *kan* begini Pak, diundangkan tanggal 6, kemudian itu *kan* tanggal 17. Saya hanya berpikir, 11, hanya 11 hari. Maksud saya dalam penyusunan *kayak gitu*, meskipun ini domainnya Kementerian Perdagangan, apakah tidak mungkin misalkan melibatkan kementerian-kementerian terkait agar tidak seperti itu? Saya takutnya nanti kalau Pertek jadi, diubah lagi, Bapak kena lagi, kira-kira seperti itu.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Jadi itu, Pak, dirapatnya di Menko *kan*, kalau merubah itu pasti Menko, enggak bisa saya, Pak. Itu rapatnya dipimpin oleh Menko dan seluruh *stakeholder* hadir, Pak, bukan cuman saya. Jadi itu Menko yang mimpin, Menteri Keuangan hadir, Menteri Perdagangan hadir, Bea Cukai hadir, Mensesneg hadir, Mensekab, semua hadir, Pak. Jadi enggak gampang juga, rapatnya *kayak gini* juga, Pak, ramai, baru nanti sepakat, anu, menyampaikan masing-masing. Nah, badannya, rumahnya itu, kalau merubah ada kait



ekspor-impor itu di Permendag, *gitu*, Permenda. Tapi kita *kan* waktu itu tidak mengira dampaknya sampai 2000 macet, *gitu*.

Nah, itulah yang saya bilang sama teman-teman, harusnya kalau kita punya niat seperti itu, disambut cepat. Nah, harusnya *kan* kementerian terkait yang sudah menjadikan ini, cepat menyambutnya. Sehingga enggak numpuk, mestinya *loh* Pak, tapi *kan* sudah. Ya kalau 2000 di sana, *kan* bisa macet juga ekonomi kita, ya kita harus ambil cepat, karena perdagangan cepat perubahannya.

Lain *dulu* saya waktu Menhut, Pak. Permenhut itu 5 tahun cuman sekali, Permenhut, 5 tahun cuman 1 kali. Kalau Perdagangan ini hampir tiap bulan, Pak, ada Permendag, hampir tiap bulan, *gitu*. Memang beda karena perdagangan mungkin lebih cepat, kalau kementerian lain beda. Kalau *dulu* saya Kehutanan 5 tahun cuman ada satu kali, saya kira demikian, Pak.

Terima kasih.

F-PDIP (Ir. HARRIS TURINO, M.Si., M.M.):

Izin, Pimpinan.

Itu tadi ada yang belum dijawab, Pak, mengenai pemotongan anggaran itu, nekat berani-beraninya ya *kan*, Bapak *kan* orang terdekat dengan presiden sekarang.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Bapak masih itu. Tadi saya pura-pura lupa, masih ditanya itu.

F-PDIP (Ir. HARRIS TURINO, M.Si., M.M.):

Karena orang terdekat dengan presiden terpilih, berani-beraninya motong *gitu loh*.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Iya, iya, iya, iya, memang saya kira Bu Menteri Keuangan, *anu*, Pak, ya, hati-hati *gitu loh*. Saya *kan* mesti, ya pasti tujuannya baiklah, lihat perkembangan dunia seperti sekarang ini ya. Misalnya, bukan mereda tapi bertambah *gitu*. Oleh karena itu, saya kira Menteri Keuangan tidak ingin pemerintahan baru nanti anggarannya itu tidak kokoh *gitu*, Pak. Oleh karena itu, kalau anggaran diperkuat cadangnya mungkin diperkuat, maka, apa namanya *tuh*, pemerintahan baru akan lebih longgar.

Saya kira perhitung-perhitungan yang seperti itu, saya kira ya. Tak mungkin Menteri Keuangan bikin orang susah *kan* enggak akan, *tapi* tadi itu,



hitungan-hitungan ya agar pemerintahan besok itu kokoh, kuat, punya cadangan yang cukup dan sebagainya dan sebagainya. *Hah?* Iya itu.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Targetnya berpengaruh enggak, Pak?

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Oh enggak ada Pak, tetap.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Oh jadi tetap? Oh lebih hebat Bapak daripada Pak Bahlil kemarin.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Oleh karena itu.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bukan. Nah, rapat berikutnya.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Yang itu berapa kira-kira bisa dibantu, terserah teman-teman *ajalah*, kami bisa dibantu berapa *aja*.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Iya, Pimpinan, Pak Menteri belum jawab, Pimpinan, yang masalah keberpihakan kepada industri, industri dalam negeri, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Saya lagi pelajari tadi, Pak. Saya juga, termasuk soal apa tadi, *menyan*, ya. Saya kira begini, Pak, tadi saya tanya "Bisa enggak kita bikin aturan yang untuk ini?", "Bisa", katanya.

Nah kalau *menyan* dan saya ada ada produk dari Kalimantan Barat, namanya kratom Pak, kratom ya? Itu kratom itu barang mahal, Pak, tapi karena bersaing antar mereka, jadi murah, Pak. Misalnya harganya itu dari 100 dolar, jadi sekarang 10 dolar, *gitu*, karena enggak diatur. Mungkin ini juga begitu, saya belum tahu apa ini, kemenyan ini. Kalau *gitu*, Pak, ada

asosiasinya atau apa, coba diatur, maunya *kayak* apa, seperti apa ya, diusulkan kepada kita, mungkin kita bisa melakukan sesuatu.

Kayak kratom itu, saya bilang asosinya bikin *aja*, kalau memang iya, ya kita atur kuota, atur kuota, sehingga nanti enggak, enggak, enggak, apa *tuh*, enggak, pohon belum *anu* juga ditebang *gitu loh*, untuk diambil daunnya, *gitu*. Nah, coba, Pak, di, maunya *kayak* apa.

Nah, kalau yang tadi minuman, saya saya setuju, *cuman gimana* caranya, Pak, ya, coba *aja* nanti Pak dipikirkan gimana caranya. Dan yang jelas Pak, nanti kitakan ada Trade Expo Indo, ikut, dipamerkan produk-produknya, *kan* enggak kalah *tuh*, ya *kan*. Nah, *kan* di Bali *udah* bagus *tuh*, *wine*-nya *udah* bagus *loh*, Pak.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Iya memang, iya, memang, Pak, *gini*, Pak, ini *kan* industrinya masih kecil, Pak, sehingga kalau dipersandingkan dengan, apa, industri-industri *wine* di luar negeri itu, akan jauh lebih kalah, Pak, karena efisien dan efektifnya yang kurang, Pak. Mereka skalanya sudah *gede*, terus kemudian *automation*, terus mesin, semuanya mereka sudah lakukan. Jadi, ini perlu keberpihakan kita untuk mengembangkan ini, paling enggak itu mungkin imbauan, kalau enggak bisa Permendag, barangkali.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Baik baik, nanti kita diskusi lebih lanjut, Pak, ya?

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Yang kedua, Pak, ini saya sedikit menyita waktu ini, karena Pak Menteri menyinggung tadi, takutnya nanti menjadi Menteri Perhubungan nanti, masalah bandara *Airport* Ngurah Rai, apa, *airport* di utara, Pak. *Airport* Utara ini penting sekali untuk pemerataan, Pak, di Bali, Pak. Bali itu, Pak, Bali itu kekuatannya adalah di budaya, Pak. Nah, budaya itu adalah komunitas. Nah, kalau kita bicara pulaunya, Pak, Bali itu tidak ada apa-apanya dengan di timurnya *aja*, sedikit enggak ada apa-apanya Pak, dengan Lombok *aja*, kalah, Pak, pulaunya, Pak.

Lombok ada, saya melihat pasirnya kayak merica, Pak, bundar-bundar, kecil-kecil, Pak, kemudian danaunya ada, gunungnya ada, ke timur lagi pasirnya *pink*, Pak, belum lagi danaunya tiga warna, kalau soal Pulau kalah, kita, Pak, tapi soal budaya Pak. Nah, budaya ini menjadi kekuatan, bisa akan hilang ketika tidak ada pemerataan di Bali itu, Pak.

Saya melihat sekarang Pak, orang Balinya di daerah selatan, Pak, karena pertumbuhannya terlalu tinggi, Pak, karena semua orang nyerbu, sampai Rusia sekarang menyerbu semua, pertumbuhan tinggi. Harga-harga naik. Di pasar, inflasinya *kan* tinggi ya, kalau pertumbuhan tinggi, inflasi tinggi,

harga-harga naik di pasar semua, Pak, sampai beli sayur dan sebagainya naik, Pak. Akhirnya yang terjadi adalah mereka segera menjual rumahnya, Pak, karena tidak bisa menurunkan gaya hidup, Pak, *lifestyle*-nya enggak bisa diturunin, makan dua kali, makan tiga kali menjadi dua kali itu, enggak bisa, Pak. Sementara, buruh yang terutama yang buruh penghasilannya rendah, kemudian pegawai negeri yang golongan 2A itu, Pak, enggak, enggak ngikutin, Pak, dengan inflasinya. Yang akhirnya, Pak, sebentar, Pak, lagi *dikit*, Pak, yang akhirnya apa, Pak? Mereka menjual rumahnya tiba-tiba tanahnya itu 1 miliar 1 are, Pak, ada sekitar berapa ya kalau, 10 juta per meter, Pak, yang akhirnya mereka pindah ke daerah yang, nah, ketika pindah itu, hilang komunitasnya, Pak. Budayanya jadi hilang, Pak, begitu juga yang di utara, Pak.

Di utara karena pertumbuhannya rendah, maka dia kesempatan kerja rendah. Ketika kesempatan kerja rendah, mereka urbanisasi ke selatan, Pak. Begitu urbanisasi ke selatan mereka meninggalkan kampungnya, artinya komunitasnya ditinggalkan, budayanya juga ditinggalkan, Pak, karena kita komunitas, Pak, itu barangkali pentingnya komunitas, Pak.

Dan ini tidak adil bagi kami di Bali terutama, Pak, di daerah utara, timur itu, Pak, kalau musim panas, Pak, nyari air *aja* susah, susah, Pak, air minum *aja* susah. Sementara di selatan, Pak, di Denpasar, di Badung akibat dari adanya, apa, pajak hotel dan restoran yang dimiliki oleh Kabupaten Badung, Pak, sekarang ini orang sakit ditunggu oleh, oleh keluarganya, Pak, yang keluarga ini dapat duit, Pak. Hebat enggak, Pak? Jadi orang sakit, keluarganya yang nunggu dapat duit. Sementara di pihak sana orang yang, apa, pada saat musim panas, air minum *aja* susah, itu, Pak.

Terima kasih, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Iya dulu, waktu saya Menteri Kehutanan dulu ya, kita diskusi panjang, Bali Utara itu kalau mau di, harusnya dikembangkan konsep sesuai dengan budaya Bali. Kalau selatan, itu sudah terlalu modern *gitu loh*, Pak. Jadi kalau penginapan ya rumah Bali, orang Bali, ya restoran, ya di sawah *gitu*, Pak. Jadi tidak merubah budaya, *gitu*.

Kita ingin, dulu diskusi panjangnya Bali Utara ya, itu tidak merubah tapi kekayaan kemajuan itu di mana orang orang Bali. Bukan hotel bintang 8, bintang 7, bukan begitu *gitu*. Jadi rumah-rumah masyarakatlah yang dibiayai, dibikin bagus. Jadi semacam *guest house-guest house* apa namanya *gitu*. Jadi betul-betul karena, orang datang itu karena budaya. Jadi tidak merubah sawahnya, tidak merubah lingkungannya, tidak merubah alamnya, tapi masyarakat diberdayakan, dibantu, didukung, sehingga orang datang itu melihat budaya Bali, bukan lihat, bukan lihat hotel yang, apa namanya *tuh*, terkurung *gitu*, itu, Pak. Sebetulnya itu *dulu, anunya*, apa, perbincangannya kira-kira.



F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Sama, sama prinsipnya untuk menjaga budaya ya? Namun kalau sekarang ini ...

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Iya, iya, iya, iya, kalau enggak ada bandara, mungkin orang susah ya?

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Ya, karena kalau infrastrukturnya juga tidak ada ke sana, orang sulit menjangkaunya, Pak, enggak akan nyampai juga orang lihat itu, Pak, pasti, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Baik. Ya *tapi* kira-kira konsepnya, apa, wisata untuk Bali, untuk masyarakat Bali *anunya*, ekonominya itu, itu, Pak. Jadi ya rumahnya masyarakat yang dibangun, *gitu-gitu*, Pak. Ya kira-kira itu, tapi tidak membangun bintang tujuh yang *kayak, kayak* di, apa namanya, yang ada di sini.

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, nanti bisa kita lanjutkan diskusinya di Bali.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Eh, yang saya enggak dijawab, apa artinya Pak Menteri mau ke tempat saya *nih*?

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Apa itu? Oh, rumput laut, rumput laut.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Nunukan, Pak, ya?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):



Iya, Pak, sama Tarakan, Pak. Enggak dijawab, berarti memang Pak Menteri mau

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Memang saya mau ke Nunukan *tuh*, Pak. Iya, pengen. Nunukan *tuh kan* perbatasan kan?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Satu titik *aja* itu, Pak, ratusan orang bekerja, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Ini contoh lagi, contoh lagi, Pak, saya bilang, kalau kita mau tumbuh 7%, rumput laut, Pak, kalau kita cuma jual bahan baku, ya seenaknya *gitu*, Pak, ya. Padahal *kan* itu satu langkah lagi, Pak, satu langkah lagi ya, dia bisa jadi agar, tepung untuk agar, bisa jadi kalau apa *tuh*, untuk kalau kita makan Jepang *kan* ada daun bungkusnya itu.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Masalahnya begini, Pak. Jadi, kebanyakan yang besar itu, manufaktur, pabriknya itu, milik China, Pak, yang kita punya kecil-kecil, akhirnya mereka mengendalikan harga. Kalau kita menjual dia di luar barang jadi, Pak, China itu mengenakan pajak, Pak, jadi mereka lebih senang.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Iya, *oke*, nanti kita ke Nunukan *bareng-barenglah*.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Siap makasih, Pak, ditunggu.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Betul itu, Pak, jadi jangan lagi *raw product*, yang kemenyan itu juga jangan lagi *raw product*, sebenarnya. Cocok, Pak.

Oke ya, cukup ya, *udah* setengah lima juga, kita masuk ke kesimpulan. Ada Pak Jon juga itu, Pak Jon, dari tadi *udah* nungguin. Kesimpulan, sudah? *Oke*.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia terkait RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran



2025, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2024, Kamis, 13 Juni 2024.

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2023 sebesar Rp2.331.166.275.137,00 (*Dua Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), 37 rupiah atau sebesar 97,53% serta mendorong Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan realisasi penyerapan anggaran di tahun 2024.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas Nomor S-346 dan seterusnya dan Menteri PPN/Kepala Bapenas Nomor B-201 dan seterusnya tanggal 5 April 2024, Pagu Indikatif Tahun 2025 sebesar Rp1.658.999.354.000,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.375.326.283.000,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - b. Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp126.849.985.000,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - c. Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp156.823.086.000,00 (*Seratus Lima Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*)

Sudah benar, Pak, angkanya? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Tiga, ini Pak Menteri jadinya 2 triliun 400 untuk tambahan?

F-PDIP (Ir. HARRIS TURINO, M.Si., M.M.):

Bisa ditebak kelihatannya periode depan, geser ini, Pak.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):



Tapi ini di sini di dokumennya 2,4 triliun, nah, oh, hah? Tambahannya? Tapi *gini*, Pak Menteri, *kan* ini belum ada tertulisnya, jadi ini kita setuju *aja* dulu. Ya ketok dulu *aja*, nantikan supaya punya bahan ke nota keuangan.

3. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terkait usulan tambahan anggaran yang telah disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Presiden Republik Indonesia *aja* ya, kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor PR.002 dan seterusnya tanggal 30 April 2024 sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (*Dua Triliun Empat Ratus Miliar rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Peningkatan peran 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan ekspor sebesar Rp900.000.000.000,00 (*Sembilan Ratus Miliar Rupiah*).
 - b. Pengembangan perdagangan antarwilayah sebesar Rp700.000.000.000,00 (*Tujuh Ratus Miliar Rupiah*).
 - c. Peningkatan ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi sebesar Rp800.000.000.000,00 (*Delapan Ratus Miliar Rupiah*).

Jadi kita ketok ya, Pak, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Sebelum kita mengakhiri rapat, apakah Pak Menteri ada *closing statement*?

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Saya kira baik, Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan, paling tidak, anggaran kita bisa kembali seperti tahun inilah, paling tidak. Karena saya sudah keliling, Pak, itu Atase Perdagangan itu menjadi andalan dubes-dubes sekarang. Andalan dubes-dubes itu ya Atase Perdagangan, satu lagi ITPC.

Tadi Bapak-bapak mengatakan, Pak Ketua juga, Pak Aria Bima, kita itu ada ITPC, Pak. Jadi, kalau produk-produk UMKM mau dititip, bisa.



Promosinya bisa *online*, Pak, bisa melalui *online*, bisa melalui macam-macam *gitu* sekarang.

Nah, jadi kalau negara itu mau perlu lihat produknya, bisa dititip di ITPC-ITPC kita. Kita ada berapa ITPC? Ada 46, Pak, *gitu*. Dan itu memang anak-anak, apa, diaspora kita, *ngumpulnya* di situ, Pak, di ITPC. Kalau mereka mau dagang, mau apa segala macam, itu, itu erat sekali hubungan antara diaspora dengan ITPC, *gitu*. Dan sebetulnya itu bisa dimanfaatkan untuk UMKM. Yang sekarang itu anggarannya yang dari, dari Kemenlu dicoret, dari kita enggak ada, *gitu*. Nanti kita lagi cari lagi gimana caranya, Pak.

Terima kasih Pak, *Makasih*.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, Pak.

Jadi, anggaran buat kos juga enggak ada mereka, boro-boro nyewa rumah, buat nge-kos enggak ada.

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta jajaran. Atas nama Pimpinan Komisi VI, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Komisi VI DPR yang telah mengikuti rapat kerja pada hari ini.

Dengan demikian, maka rapat kami tutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.44 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001

